



RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR POM DI MANADO

TAHUN 2025–2029



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA
☎ 0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manoado](https://www.instagram.com/bpom.manoado)



[bpom.manoado](https://www.facebook.com/bpom.manoado)



[BpomManado](https://wa.me/62151824686)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai%20Bes%20POM%20di%20Manado)



BALAI BESAR POM DI MANADO

**TOLAK
GRATIFIKASI**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MANADO

NOMOR HK.02.02.19A.12.25.207 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MANADO TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANADO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Manado tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BALAI BESAR POM DI MANADO TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI MANADO TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Manado, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Manado memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Manado untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Manado sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Manado dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Manado.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal : 05 Desember 2025
Kepala Balai Besar POM di Manado



HERMANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum	1
I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado Tahun 2020 – 2024	5
I.1.2 Aspirasi Stakeholder	55
I.2 Potensi dan Permasalahan	57
I.2.1 <i>Kekuatan (Strength)</i>	58
I.2.2 <i>Weakness</i>	65
I.2.3 <i>Opportunity</i>	72
I.2.4 <i>Threats</i>	74
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	80
II.1 Visi	80
II.2 Misi	81
II.3 Tujuan	83
II.4 Sasaran Kegiatan	86
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM.....	104
III. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	104
III. 2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Manado	108
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	137



IV.1 Target Kinerja	137
IV.2 Kerangka Pendanaan	142
BAB V PENUTUP	144
LAMPIRAN	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Organisasi Balai Besar POM di Manado	3
Gambar 1. 2	Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Manado	4
Gambar 1. 3	Nilai Kinerja Balai Besar POM di Mando Tahun 2020 – 2024	12
Gambar 1. 4	Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024 ..	16
Gambar 1. 5	Tren Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020- 2024	16
Gambar 1. 6	Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 – 2024	17
Gambar 1. 7	Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 – 2024	18
Gambar 1. 8	Tren Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2021- 2024	20
Gambar 1. 9	Tren Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Manado Tahun 2020-2024	22
Gambar 1. 10	Tren Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.....	24
Gambar 1. 11	Tren Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	26
Gambar 1. 12	Tren Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Manado Tahun 2020-2024	27
Gambar 1. 13	Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang DilaksanakanTahun 2020-2024	28
Gambar 1. 14	Tren Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024	29

Gambar 1. 15	Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024	30
Gambar 1. 16	Tren Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024.....	31
Gambar 1. 17	Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024	32
Gambar 1. 18	Tren Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Manado Tahun 2020-2024	33
Gambar 1. 19	Tren Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022-2024.....	34
Gambar 1. 20	Tren Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	37
Gambar 1. 21	Tren Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Tahun 2020-2024.....	38
Gambar 1. 22	Tren Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020-2024	39
Gambar 1. 23	Tren Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020-2024.....	40
Gambar 1. 24	Tren Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024	42
Gambar 1. 25	Tren Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024.....	43
Gambar 1. 26	Tren Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	44
Gambar 1. 27	Tren Indeks RB BBPOM di Manado Tahun 2020-2024.....	46
Gambar 1. 28	Tren Nilai AKIP Tahun 2020-2024.....	48
Gambar 1. 29	Tren Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Manado Tahun 2020-2024	50
Gambar 1. 30	Tren Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2020-2024	51

Gambar 1. 31	Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Manado yang Optimal Tahun 2020-2024.....	53
Gambar 1. 32	Tren Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Manado Tahun 2020-2024.....	54
Gambar 1. 33	Nilai Indeks Pelayanan Publik 2020-2024	59
Gambar 1. 34	Rekapitulasi Kesenjangan Pemenuhan Kompetensi Tahun 2025.....	62
Gambar 1. 35	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	66
Gambar 1. 36	Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Manado v.s Jumlah Eksisting (Data SIASN per 06 November 2025)	68
Gambar 1. 37	Proporsi Pemenuhan Standar Kompetensi	70
Gambar 2. 1	Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Manado Tahun 2020-2024	5
Tabel 1. 2	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Balai Besar POM di Mando Tahun 2020 – 2024	13
Tabel 1. 3	Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan.....	63
Tabel 1. 4	Matriks Ringkasan Analisis SWOT	79
Tabel 2. 1	Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	85
Tabel 2. 2	Pemetaaan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Manado periode 2025-2029	91
Tabel 2. 3	Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Manado	94
Tabel 3. 1	Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	107
Tabel 3. 2	Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Manado	110
Tabel 4. 1	Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Manado 2025-2029	137
Tabel 4.2.1	Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Manado 2025-2029.....	142
Tabel 4.2.2	Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Manado 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana	143

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan amanat bahwa perencanaan pembangunan disusun secara periodik meliputi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 berfokus pada Penguatan Fondasi Transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong. Badan POM mengemban fungsi strategis dalam sistem Kesehatan Nasional dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri dari Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Balai Besar POM di Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan Balai Besar POM dengan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Manado menyelenggarakan fungsi:

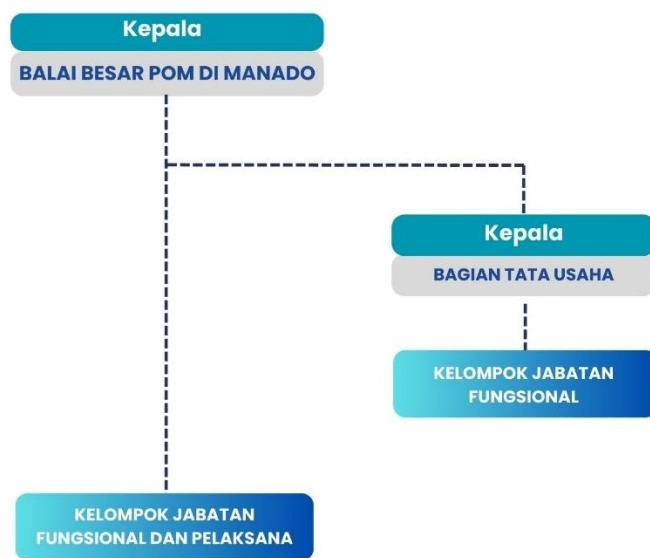
- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh

Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dalam hal ini Balai Besar POM di Manado sebagai UPT di daerah turut serta melaksanakan amanat tersebut.

Stuktur Organisasi dan tata kerja Balai Besar POM di Manado disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Manado berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

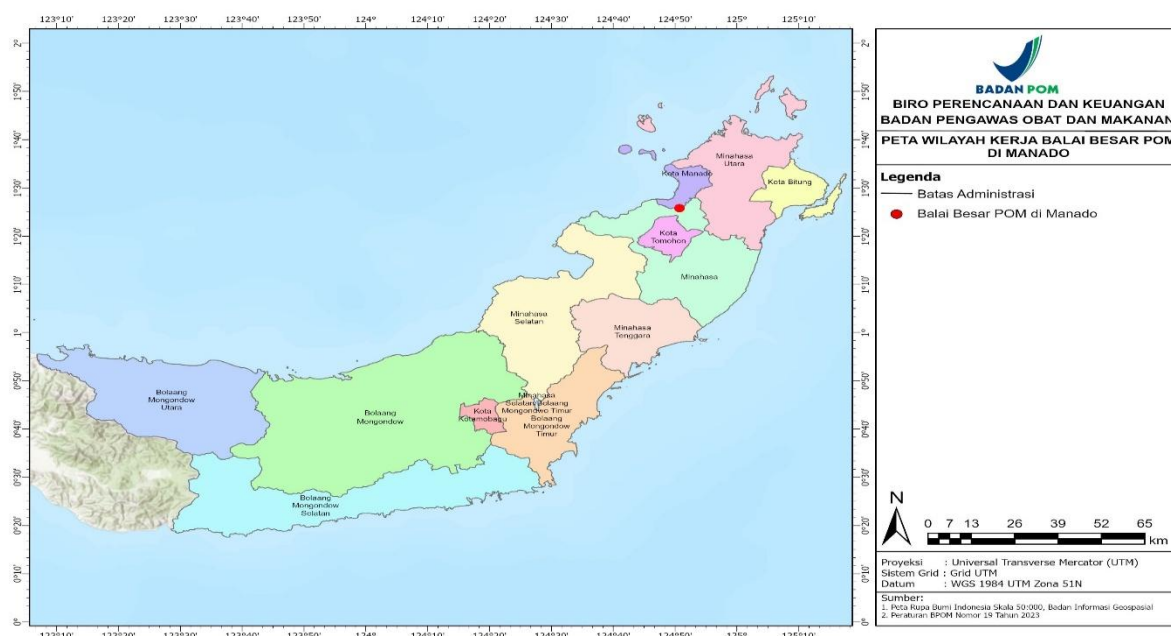
Bagan organisasi Balai Besar POM di Manado seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Manado

Wilayah kerja Balai Besar POM di Manado berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025, wilayah kerja Balai Besar POM di Manado mencakup 12 Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung,

Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa di wilayah Sulawesi Utara terdapat Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cakupan wilayah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro



Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Manado

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado Tahun 2020 – 2024

Tabel 1. 1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Manado Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Sk 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado															
1.1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	84.00	88.74	105.64	88.50	96.51	109.05	89.50	93.77	104.77	90.50	98.41	108.74	98.50	98.42	99.92
1.2.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84.00	91.89	109.39	92.00	89.61	97.40	93.00	88.41	95.06	91.89	95.13	103.52	96.00	97.00	101.04
1.3.	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86.00	91.53	106.43	92.00	96.80	105.22	93.00	93.00	100.00	94.00	97.88	104.13	98.00	97.00	98.98
1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	86.00	88.59	103.01	88.50	90.91	102.72	90.00	77.69	86.32	86.00	88.12	102.46	89.00	89.39	100.44
1.5.	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat***				93.00	96.00	103.23	94.00	96.15	102.29	95.00	98.00	103.16	97.00	100.00	103.09
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan															

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado															
2.1.	Indeks kesadaran Masyarakat (<i>awarness index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado	72.00	78.22	108.64	81.00	78.15	96.48	84.00	85.32	101.57	86.00	91.79	106.73	92.00	92.71	100.77
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado															
3.1.	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	83.10	88.79	106.85	89.90	85.60	95.22	91.00	97.80	107.47	92.20	99.20	107.59	99.30	99.45	100.15
3.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan	72.00	81.16	112.72	83.37	69.70	83.60	85.59	76.82	89.75	81.16	85.51	105.36	87.35	86.79	99.36

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Obat dan Makanan															
3.3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Manado	82.50	88.12	106.81	90.00	94.76	105.29	91.00	95.44	104.88	92.00	99.05	107.66	99.50	99.60	100.10
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Manado															
4.1.	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	87.00	82.74	95.10	89.00	94.67	106.37	91.00	95.76	105.23	93.00	96.02	103.25	96.50	100.00	103.63
4.2.	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	63.70	56.09	88.05	63.00	85.00	134.92	65.00	71.43	109.89	70.00	81.55	116.50	81.70	97.94	119.88
4.3.	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	95.00	98.34	103.52	98.00	98.87	100.89	99.00	100.00	101.01	99.00	99.75	100.76	100.00	100.00	100.00
4.4.	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang	67.00	71.23	106.32	71.00	68.09	95.90	76.00	85.19	112.09	80.00	88.61	110.76	90.00	92.86	103.18

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Memenuhi Ketentuan															
4.5.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60.00	67.76	112.93	68.00	65.75	96.69	70.00	78.79	112.56	75.00	84.74	112.99	85.00	92.35	108.65
4.6.	Indeks Pelayanan Publik	3.51	3.91	111.40	4.20	4.38	104.29	4.30	4.10	95.35	4.25	4.62	108.71	4.70	4.91	104.47
4.7.	Persentase UMKM yang Memenuhi Standart Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik****							77.00	100.00	129.87	79.00	100.00	126.58	100.00	100	100.00
4.8.	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota* ****													95.00	99.54	104.78
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado															
5.1.	Tingkat Efektivitas KIE	85.21	90.22	105.88	92.00	90.89	98.79	93.80	95.91	102.25	95.70	97.53	101.91	98.40	99.15	100.76

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Obat dan Makanan															
5.2.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	18	112.50	40.00	41.00	102.50	59.00	59.00	100.00	77.00	79.00	102.60	97.00	101	104.12
5.3.	Jumlah Desa Pangan Aman	4.00	4.00	100.00	12.00	12.00	100.00	19.00	19.00	100.00	25.00	25.00	100.00	32.00	32.00	100.00
5.4.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya* Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas***	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	11.00	11.00	100.00
SK 6	Meningkatnya efektivitas pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado															
6.1.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar	95.00	94.70	99.68	100.00	98.42	98.42	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6.2.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar	95.00	99.25	104.47	100.00	100.00	100.00	100.00	92.38	92.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado															
7.1.	Persentase Keberhasilan	63.00	102.88	163.31	97.00	89.90	92.68	98.00	100.00	102.04	99.00	95.00	95.96	96.00	96.97	101.01

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan															
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Manado yang optimal															
8.1.	Indeks RB BBPOM di Manado	88.00	81.85	93.01	83.90	83.89	99.99	85.90	90.26	105.08	87.90	94.05	107.00	95.05	94.35	99.26
8.2.	Nilai AKIP BBPOM di Manado	80.00	77.73	97.16	80.20	78.20	97.51	82.70	81.41	98.44	85.20	82.70	97.07	84.65	82.12	97.01
8.3.	Nilai Pengelolaan Kearsipan*****													95.24	96.97	101.82
SK 9	Terwujudnya SDM BBPOM di Manado yang berkinerja optimal															
9.1.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Manado	75.00	84.65	112.86	84.75	84.88	100.15	85.00	85.54	100.64	85.25	90.35	105.98	91.31	87.71	96.06
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan															
10.1.	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP	72.00	71.80	99.72	76.00	76.47	100.62	81.00	80.50	99.38	86.00	83.55	97.15	84.50	88.33	104.53
10.2.	Indeks Pengelolaan	1.51	1.95	129.14	2.00	2.35	117.50	2.25	2.75	122.22	2.50	3.00	120.00	3.00	3.00	100.00

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Data dan Informasi UPT yang optimal															
SK 11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Manado secara Akuntabel															
11.1.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Manado	93.00	93.79	100.85	93.60	90.99	97.21	94.20	91.05	96.66	95.40	90.14	94.49	90.92	97.27	106.98
11.2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran **	95.00	100	105.26	95.00	100.00	105.26									
11.3.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa*****													90.44	100.00	110.57
11.4.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara*****													94.00	98.58	104.87
11.5.	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri*****													67.19	88.65	131.94

Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai kinerja Balai Besar POM di Manado periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Manado selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 (naik 4.93 poin) kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 namun masih dapat memperoleh predikat Istimewa sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3 berikut.



Gambar 1. 3 Nilai Kinerja Balai Besar POM di Mando Tahun 2020 – 2024

Pengukuran kinerja Balai Besar POM di Manado mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Manado dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Manado. Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai Besar POM di Manado menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Tabel 1. 2 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Balai Besar POM di Manado Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2020	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2021	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2022	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2023	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	106.12	103.52	97.69	104.41	100.69
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	108.64	96.48	101.57	106.73	100.77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	108.79	94.70	100.70	106.87	99.87
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Manado	102.89	104.02	107.45	110.42	108.07
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan	104.59	100.32	100.56	101.13	101.22

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2020	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2021	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2022	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2023	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024
	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado					
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	102.08	99.21	96.19	120.00	120.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	120.00	92.68	102.04	95.96	101.01
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Manado yang optimal	95.09	98.75	101.76	102.03	99.36
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Manado yang berkinerja optimal	112.87	100.15	100.64	105.98	96.06
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	109.86	109.06	109.69	120.00	112.27
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Manado secara Akuntabel	103.06	101.24	96.66	94.49	110.61

Balai Besar POM di Manado memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 29 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Selama 5 tahun terakhir, capaian kinerja Balai Besar POM di Manado mengalami dinamika yang bervariasi, berbagai faktor, baik internal maupun eksternal mempengaruhi pola pertumbuhan yang tidak linier. Meskipun terdapat fluktuasi Balai Besar POM di Manado terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target secara berkelanjutan. Berbagai strategi dan inovasi telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi serta pencapaian target.

Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap Indikator Kinerja Sasaran kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan (SK1)

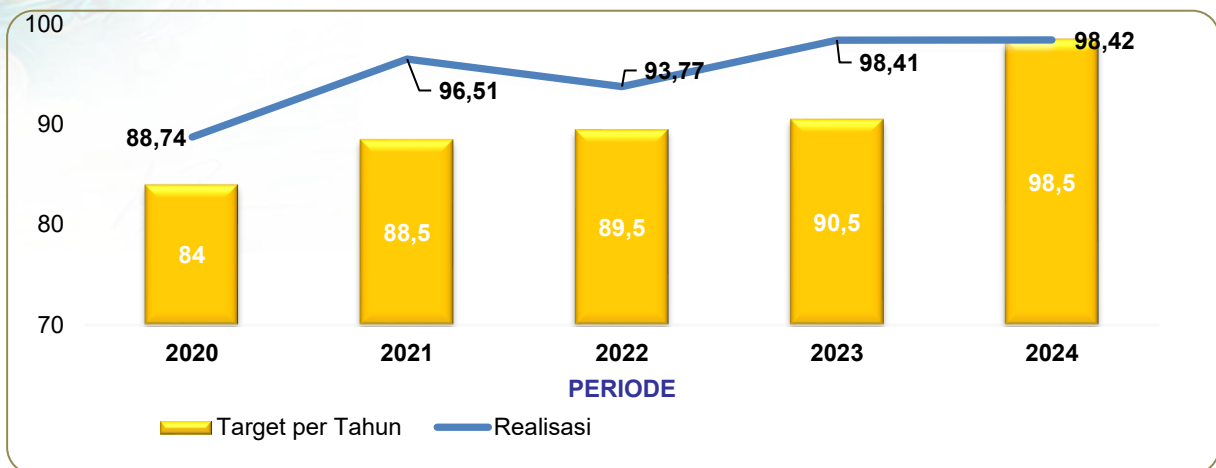
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Manado tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal - hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado memiliki tren NPS yang fluktuatif, nilai tahun 2024 sebesar 100.69% lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, namun masih dibawah nilai tahun 2020-2021 dan 2023 akibat adanya peningkatan sampel yang TMS dimana sebagian besar sampel yang TMS tersebut diproduksi oleh Perusahaan yang berada di luar wilayah kerja Balai Besar POM di Manado sehingga tidak dapat dilakukan intervensi lebih lanjut kepada produsen selain hal tersebut peningkatan target kinerja yang cukup signifikan juga mempengaruhi pencapaian nilai sasaran

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

IKSK.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

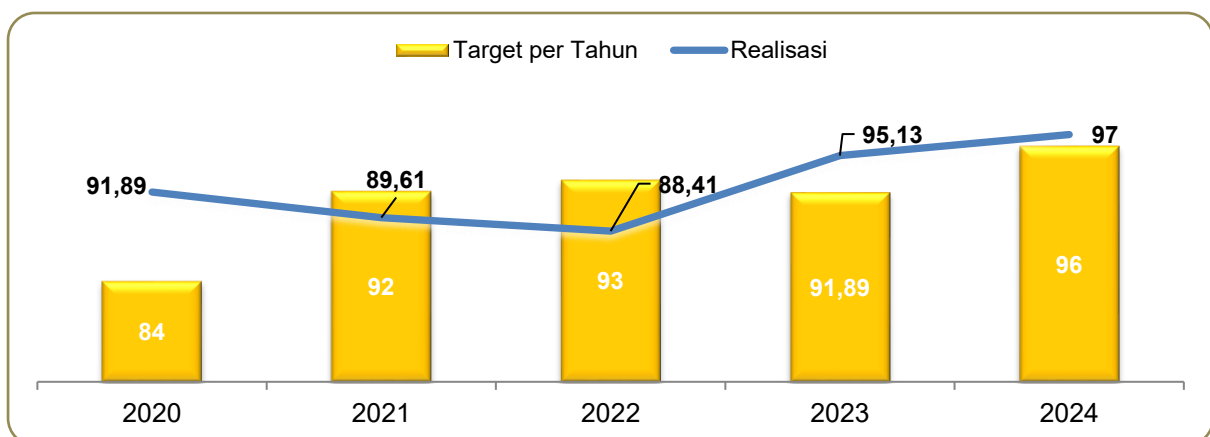


Gambar 1. 4 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Pengukuran terhadap indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat didasarkan pada kerangka sampling random dengan beberapa kriteria yaitu (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

IKSK 1.1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 88.74% pada tahun 2020 menjadi 98.42% pada tahun 2024, namun target 2024 tidak tercapai hal ini disebabkan peningkatan sampel Obat yang disampling secara random yang ditemukan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang disimpulkan TMS maupun Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengujian.

IKSK .1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

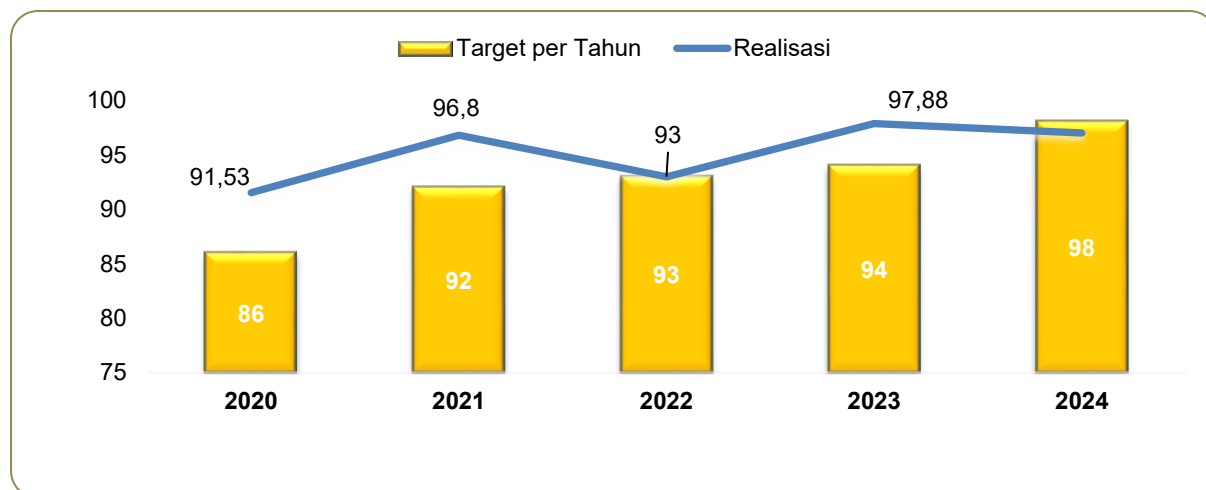


Gambar 1. 5 Tren Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Pengukuran terhadap indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat didasarkan pada kerangka sampling random dengan beberapa kriteria yaitu (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

IKSK 1.2 memiliki tren peningkatan realisasi dari 91.89% pada tahun 2020 menjadi 97% pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa pengambilan sampel semakin *representative* terhadap jumlah Makanan beredar. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Dibandingkan dengan target kinerja, IKSS 3 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan realisasi.

IKK.1.3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

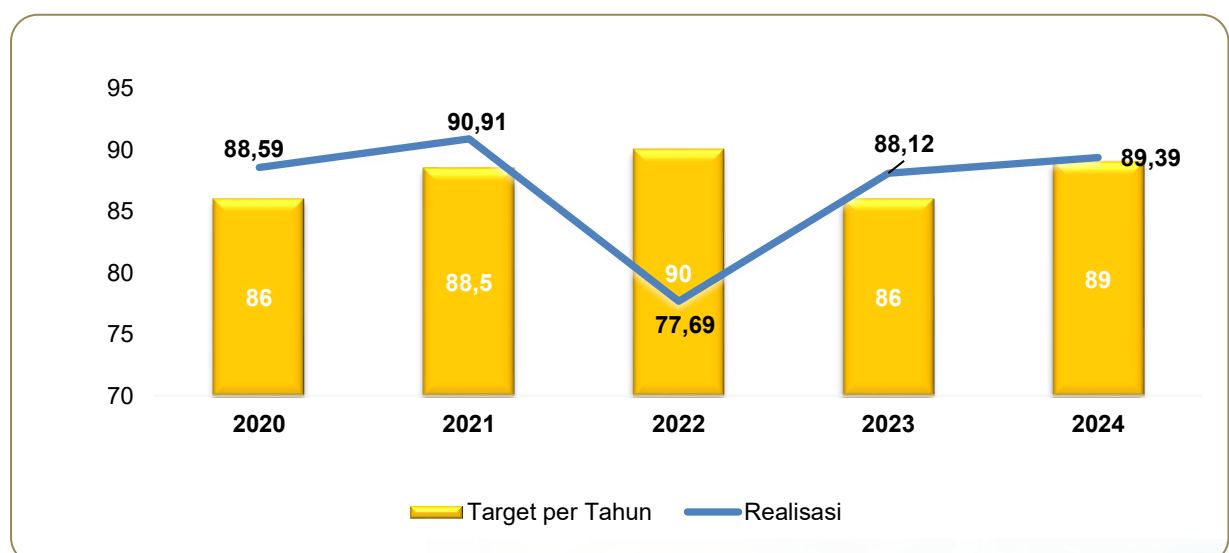


Gambar 1. 6 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 – 2024

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. *Sampling targeted* merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip *targeted*.

IKSK 1.3 memiliki tren peningkatan realisasi dari 91.53% pada tahun 2020 menjadi 97.00%, Pada tahun 2020 hingga 2023 realisasi indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan selama 4 tahun tersebut dapat tercapai melebihi target tahunan pada tahun 2024 namun target 2024 ini tidak tercapai. Penyebab tidak tercapainya target indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Manado yaitu adanya penurunan Tingkat kepatuhan pelaku usaha produsen Obat sehingga peredaran produk Obat yang Tidak Memenuhi syarat (TMS) lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Selain itu, adanya perubahan proporsi kategori sampling tahun 2024 dibandingkan dengan proporsi kategori sampling yang dilaksanakan pada tahun 2023. Perubahan yang terjadi adalah adanya proporsi pengambilan sampel secara targeted pada media online yang lebih besar dibandingkan tahun 2023 meliputi produk yang dijual di media sosial, website, serta e-Commerce. Hal ini dilakukan karena adanya peningkatan aktifitas peredaran sediaan farmasi melalui media *online*. Pengambilan sampel pada media *online* tersebut dilakukan untuk beberapa komoditi antara lain komoditi kosmetik, obat bahan alam, suplemen Kesehatan, serta obat kuasi. Target pengambilan sampel pada media online ditetapkan oleh direktorat terkait berdasarkan hasil survey media *online* yang berada di wilayah kerja UPT

IKSK.1.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan



Gambar 1. 7 Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 – 2024

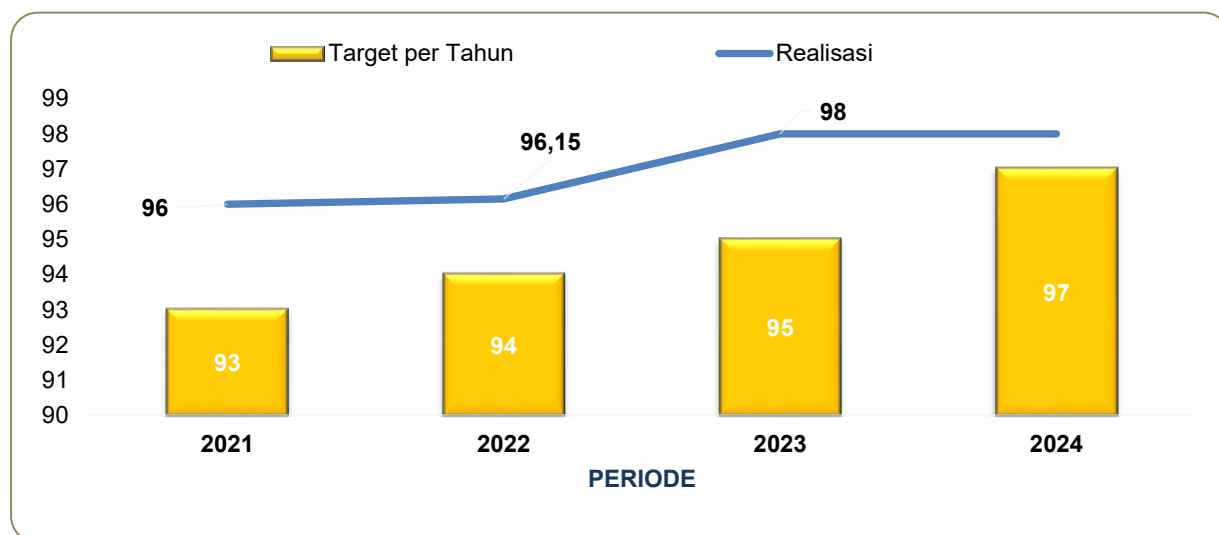


Makanan yang aman dan bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

IKSK 1.4 memiliki tren peningkatan realisasi dari 88.59% pada tahun 2020 menjadi 89.39% pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa produk makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Manado merupakan produk yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Manado dalam menekan jumlah sampel yang TMS, yaitu berupa Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan pengawasan makanan. Kegiatan yang dimaksud adalah Bimbingan Teknis Peredaran Pangan Olahan yang Baik bagi pelaku usaha distributor pangan, serta koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini pemerintah Kota Manado dalam pengawasan Air Minum Isi Ulang (AMIU). Selain itu, pencapaian tersebut juga didukung oleh pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman prioritas sampling tahun 2024 yang terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024. Terkait dengan koordinasi dalam hal pengawasan AMIU, sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan menjadi kewenangan Menteri dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dimana lokasi usaha Depot AMIU tersebut berada. Namun, Badan POM sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui BBPOM di Manado berinisiatif melakukan pengawasan melalui sampling dan juga mendorong pengawasan oleh pemerintah daerah pada AMIU melalui beberapa upaya. Salah satu upaya yang dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor adalah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penanganan Air Minum Isi Ulang (AMIU). Kegiatan tersebut didasarkan atas kendala yang dihadapi dalam pencapaian target di Tahun 2022. Sehingga, pada tahun 2023 BBPOM di Manado menginisiasi kegiatan penanganan AMIU, kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan FGD dan dilanjutkan Bimtek Penanganan Permasalahan Air Minum Isi Ulang (AMIU) dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang diikuti dengan penyesuaian anggaran. Pada tahun 2023 telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Perindag dan

DPM-PTSP. Pendampingan yang telah dilaksanakan adalah Focus Group Discussion (FGD) Permasalahan AMIU. Pendataan Pelaku Usaha di Kota Manado, Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha AMIU. Penyusunan Perwako Pengawasan dan Pembahasan harmonisasi usulan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di kantor wilayah Kemenkum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga, pada awal Februari Tahun 2024 telah terbit Peraturan Wali Kota Manado Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang.

IKSK.1.5.Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat



Gambar 1. 8 Tren Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2021-2024

Indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat merupakan indikator baru pada tahun 2021. Pengukuran terhadap indikator persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat didasarkan pada kerangka sampling dengan beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

IKSK 1.5 memiliki tren peningkatan realisasi dari 96% pada tahun 2020, menjadi 100% pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa produk pangan fortifikasi yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Manado yang memenuhi syarat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja merupakan dampak positif dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berada di wilayah

kerja sehingga kepatuhan pelaku usaha dan produk yang dihasilkan memenuhi syarat. Realisasi pada tahun 2024 ini lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, pada tahun 2023 terdapat sampel yang pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan hasil tersebut BBPOM di Manado melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana yang dilakukan sampling, sehingga pada tahun 2024 realisasi dapat meningkat menjadi 100%. Pencapaian tersebut juga didukung oleh pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman prioritas sampling tahun 2024 yang terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024.

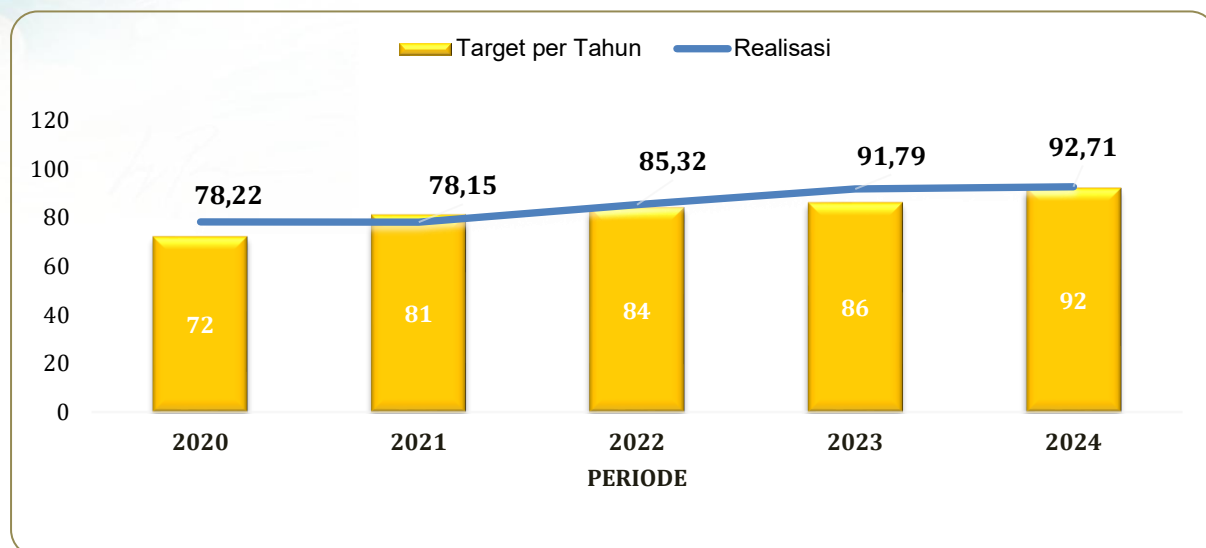
Sasaran Kegiatan (SK 2)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado

Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dipasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Manado melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado memiliki tren NPS yang fluktuatif, nilai tahun 2024 sebesar 100.77% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, namun masih dibawah nilai tahun 2020 dan 2022-2023, namun dari sisi realisasi untuk sasaran ini mengalami rata-rata kenaikan di tiga tahun terakhir yaitu sebesar 4.85 hal ini menunjukkan keberhasilan program Balai Besar POM di Manado dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan Masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE). Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado

IKK 2.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Manado



Gambar 1. 9 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Manado Tahun 2020-2024

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu **Pengetahuan**, **Sikap** dan **Perilaku**. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Manado dengan pembinaan dan bimbingan melalui program Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

IKSK 2 1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 78.22 pada tahun 2020 menjadi 92.71 pada tahun 2024. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu selama 4 tahun terakhir cenderung fluktuatif dimana pada tahun

2021 target tidak tercapai, namun 3 tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan walaupun dengan target yang selalu naik setiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 91.79 meningkat 6.47 poin bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 85.32. Realisasi tahun 2024 sebesar 92.71 melebihi target akhir periode Renstra 2020-2024. Trend indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan positif mulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Tahun 2021 mengalami penurunan dimana salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekspektasi masyarakat meningkat terhadap BPOM

Sasaran Kegiatan (SK 3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado

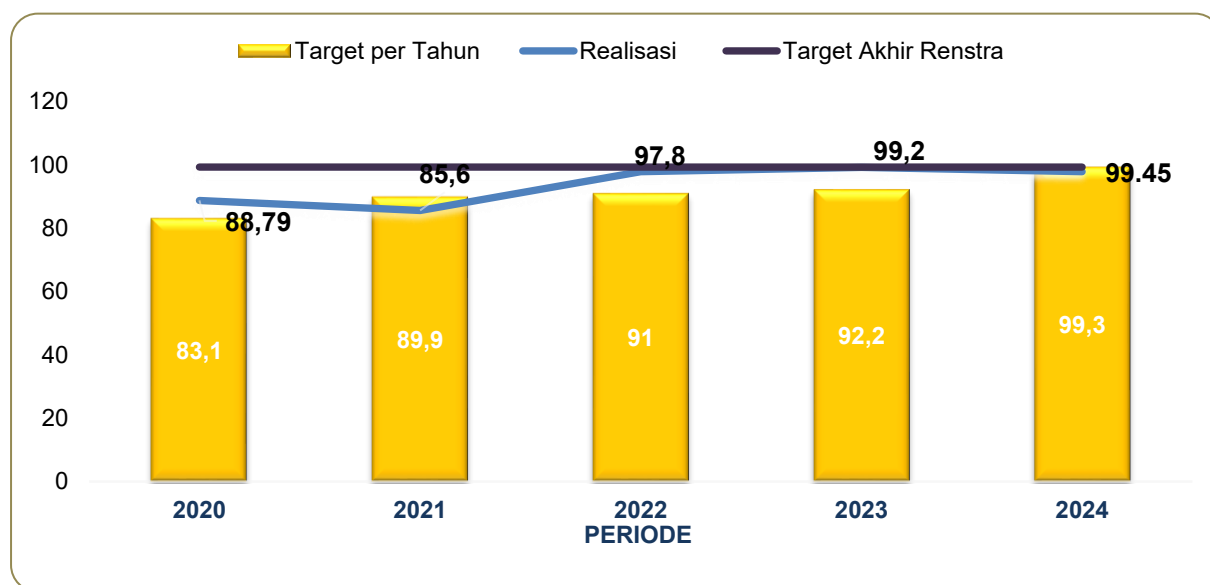
Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Balai Besar POM di Manado berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Manado, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik bertujuan untuk mendukung Rencana Strategis Balai Besar BPOM di Manado 2020 - 2024 disisi lain layanan publik bertujuan untuk mendukung kemudahan usaha dan perekonomian Nasional.

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado memiliki tren NPS yang fluktuatif, nilai sasaran tahun 2024 sebesar 99.87% lebih tinggi dari NPS tahun 2021 sebesar 94.70% yang saat itu turun sangat signifikan diakibatkan adanya pandemi covid 19 sehingga menyebabkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pengawasan Obat dan Makanan, jika dibandingkan NPS tahun 2024 lebih rendah dibandingkan NPS tahun 2020 dan 2022-2023. Peningkatan target indikator kinerja yang cukup signifikan merupakan salah satu faktor penyebab turunnya NPS di tahun 2024, disatu sisi penurunan NPS tidak dapat diartikan bahwa Balai Besar POM di Manado tidak berhasil dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan karena jika dilihat dari realisasi indikator kinerja yang menjadi indikator pembentuk dari NPS menunjukkan adanya peningkatan realisasi sejak tahun 2021-2024. Seiring dengan pengembangan teknologi Balai Besar POM di Manado telah mengimplementasikan berbagai layanan digital diantara melalui inovasi Pintu Mapalus Kawanua (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu Kemandirian dan

Pendampingan Pelaku Usaha Melalui Kolaborasi Pengawasan UMKM) dengan platform digital terintegrasi serta pendekatan literasi komprehensif, inovasi ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan namun juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan; (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Manado

IKSK.3.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan



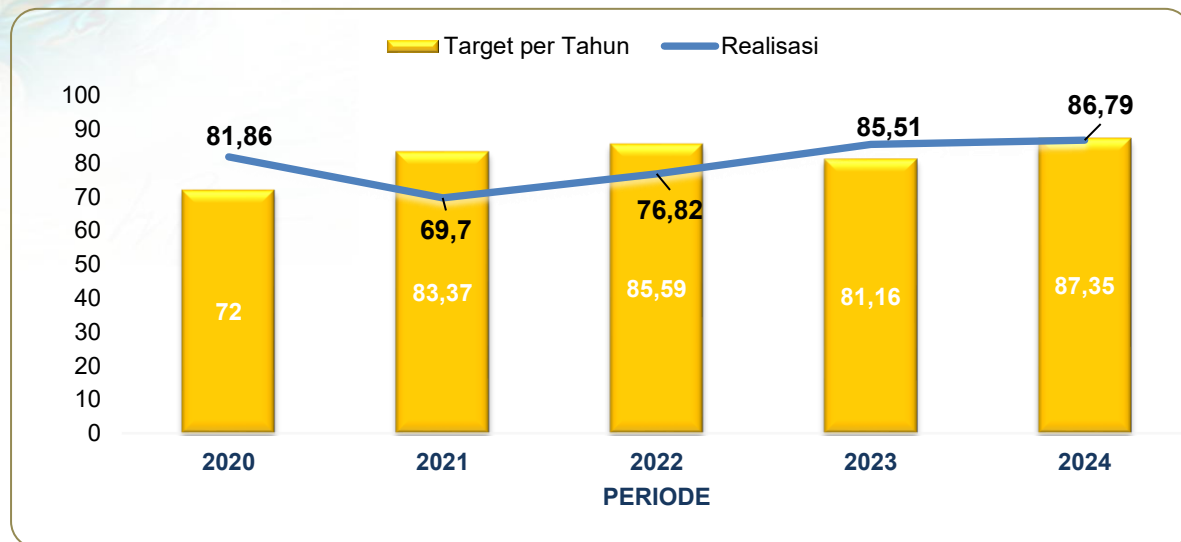
Gambar 1. 10 Tren Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan Balai Besar POM di Manado kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (regulatory assistance). Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan

pembinaan dari Balai Besar POM di Manado dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

IKSK 3.1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 88.79 pada tahun 2020 menjadi 99.45 pada tahun 2024 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Manado merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BBPOM di Manado, meliputi bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup pendampingan, desk, sosialisasi / seminar / workshop / pelatihan / bimbingan teknis terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan yang mencakup produsen, distributor, importer, eksportir, dan sarana pelayanan. Tren realisasi kinerja dari tahun 2021 - 2024 menunjukkan hasil yang cenderung meningkat dimana tahun 2021 realisasi 85.6 dari target 89.9, tahun 2022 tercapai 97.8 dari target 91, tahun 2023 tercapai 99.23 dari target 92.2 dan tahun 2024 tercapai 99.45 dengan capaian sebesar 100.15%, dimana hasil yang dicapai juga merupakan nilai tertinggi selang waktu 2020 – 2024 serta melebihi target secara nasional. Adanya pengembangan dari Inovasi Pintu Mapalus menjadi “PINTU MAPALUS KAWANUA 2.0” (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu Kemandirian dan Pendampingan Pelaku Usaha melalui Kolaborasi Pengawasan UMKM berdaya Saing) dengan menerapkan konsep *one stop services*, penambahan unsur peningkatan literasi dan fitur-fitur berupa penambahan modul pendaftaran untuk obat bahan alam dan kosmetik, unsur AI sebagai chat bot, notifikasi kepada petugas pendampingan UMKM, FAQ, data hasil pengawasan diintegrasikan dalam database pengawasan post market dan ramah kelompok rentan melalui *widget Accessibility* serta kolaborasi dan sinergitas dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pendampingan UMKM seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM serta melibatkan UMKM sebagai fasilitator secara aktif juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai Indeks kepuasan pelaku usaha ini.

IKK.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

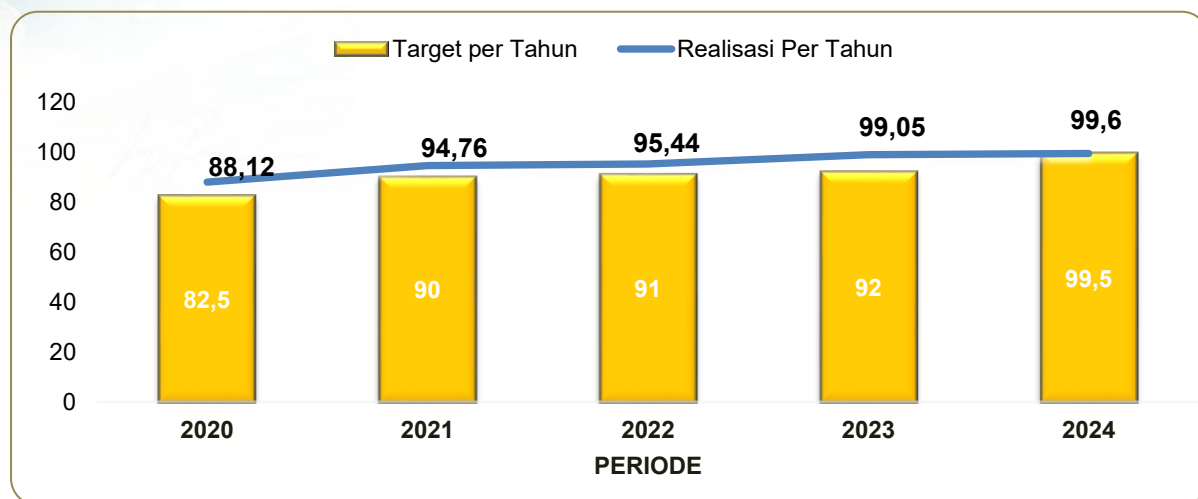


Gambar 1. 11 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *service quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, dengan 4 (empat) dimensi kepuasan masyarakat, yaitu **Reliability**, **Assurance**, **Responsiveness** dan **Empathy**.

IKSK 3.2 memiliki tren peningkatan realisasi dari 81.16 pada tahun 2020 menjadi 86.79 pada tahun 2024. Dari tahun 2020-2024 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan baik per komoditi maupun secara nasional terus meningkat meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Namun demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa selama tahun empat tahun terakhir kinerja pengawasan Obat dan Makanan baik *pre-market* maupun *post-market* berhasil dengan “Baik” meski menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaannya.

IKSK.3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar BPOM di Manado



Gambar 1. 12 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Manado Tahun 2020-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKSK 3.3 memiliki tren peningkatan realisasi dari 88.12 pada tahun 2020 menjadi 99.60 pada tahun 2024. Terdapat konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Manado selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh unsur pelayanan secara optimal dan efektif dari seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Manado

Sasaran Kegiatan (SK4)

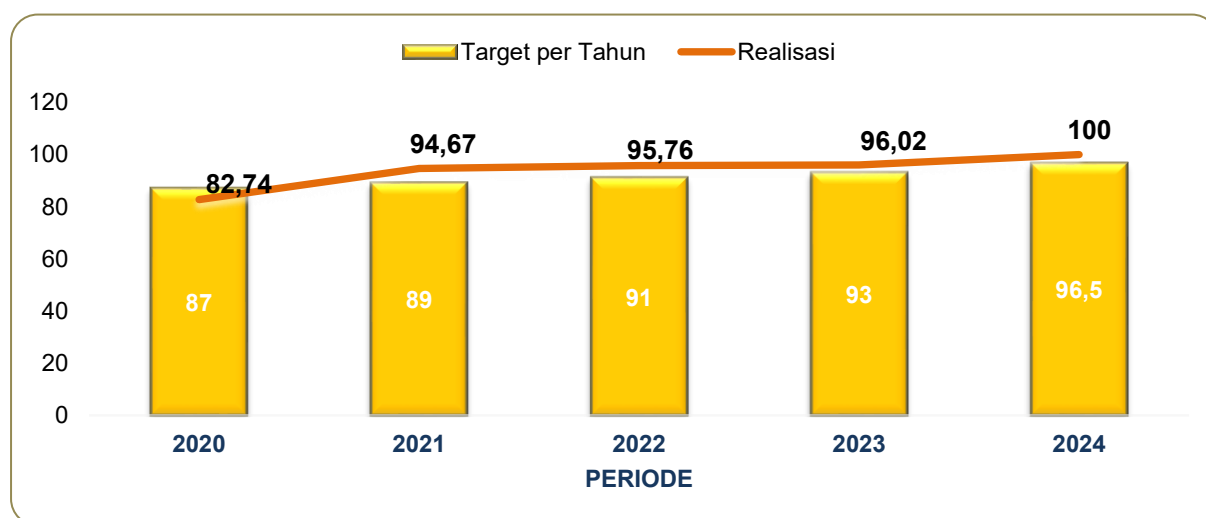
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun

distributor dalam turut serta penyampaian Obat dan Makanan sampai ke masyarakat sehingga Obat dan Makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Manado memiliki tren NPS naik sejak tahun 2020-2023, namun kemudian sedikit mengalami penurunan ditahun 2024 yaitu sebesar 108.07. Peningkatan target indikator kinerja yang cukup signifikan merupakan salah satu faktor penyebab turunnya NPS di tahun 2024. Jika dilihat dari indikator pembentuk dari NPS 4 pada tahun 2024 secara keseluruhan target dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Manado telah melakukan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif serta berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana ditribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Indeks Pelayanan Publik; (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

IKSK.4.1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

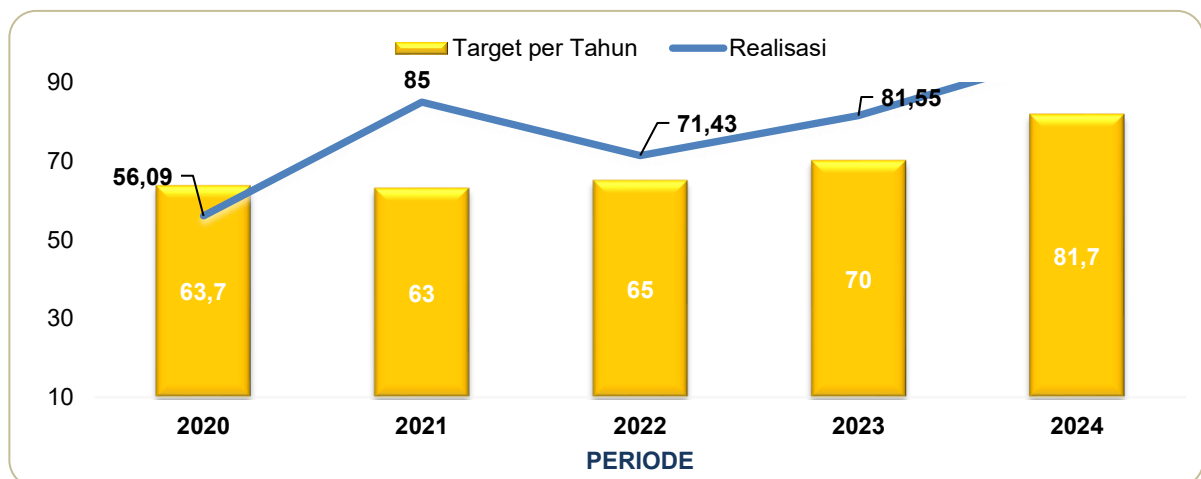


Gambar 1. 13 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020-2024

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana obat dan makanan (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID, termasuk kepada Badan POM dalam rangka verifikasi), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

IKSK 4.1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 82.74 pada tahun 2020 menjadi 100 pada tahun 2024. Dari tahun 2020-2024 persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 hingga 2024 terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang efektif, baik dengan pihak internal maupun eksternal, menjadi kunci utama dalam memastikan setiap rekomendasi hasil inspeksi dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

IKSK.4.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

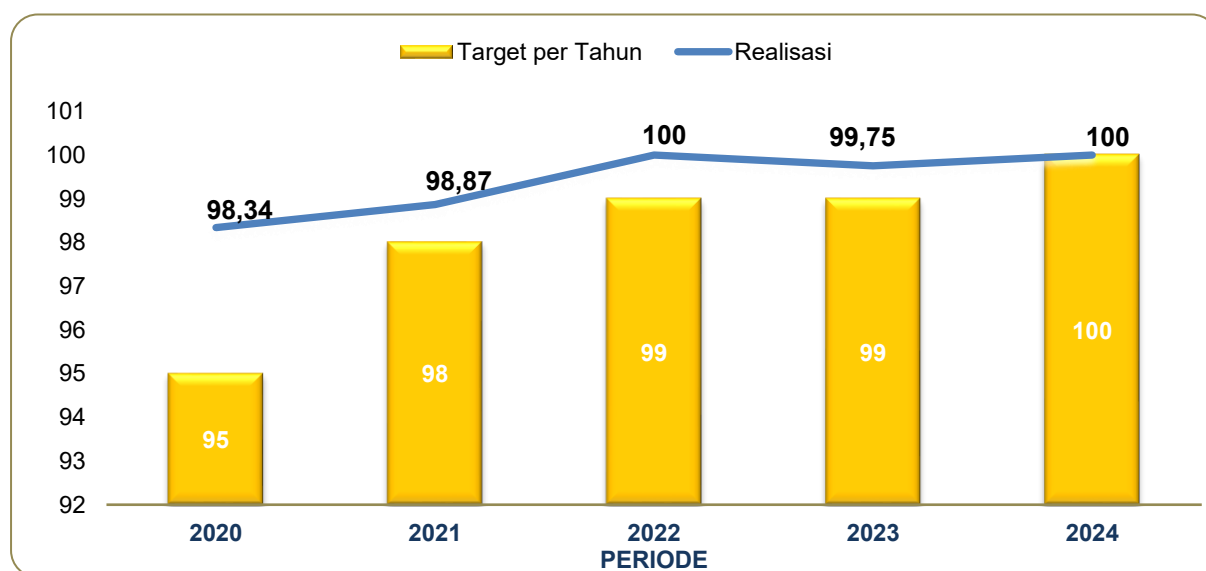


Gambar 1. 14 Tren Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan merupakan rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Manado kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: pelaku usaha dan lintas sektor (Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

IKSK 4.2 memiliki tren peningkatan realisasi dari 56.09 pada tahun 2020 menjadi 97.94 pada tahun 2024. Dari tahun 2020-2024 persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan merupakan indikator kinerja dengan tantangan yang cukup berat. Hal ini karena realisasi indikator kinerja dipengaruhi oleh pihak eksternal, yaitu pelaku usaha dan juga lintas sektor. Meskipun tantangannya berat, Balai Besar POM (BBPOM) di Manado berhasil mencapai target dengan capaian yang sangat baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya keras seluruh petugas BBPOM di Manado. Mereka secara aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pelaku usaha serta memberikan bimbingan dalam melaksanakan rekomendasi yang dikirimkan.

IKSK.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

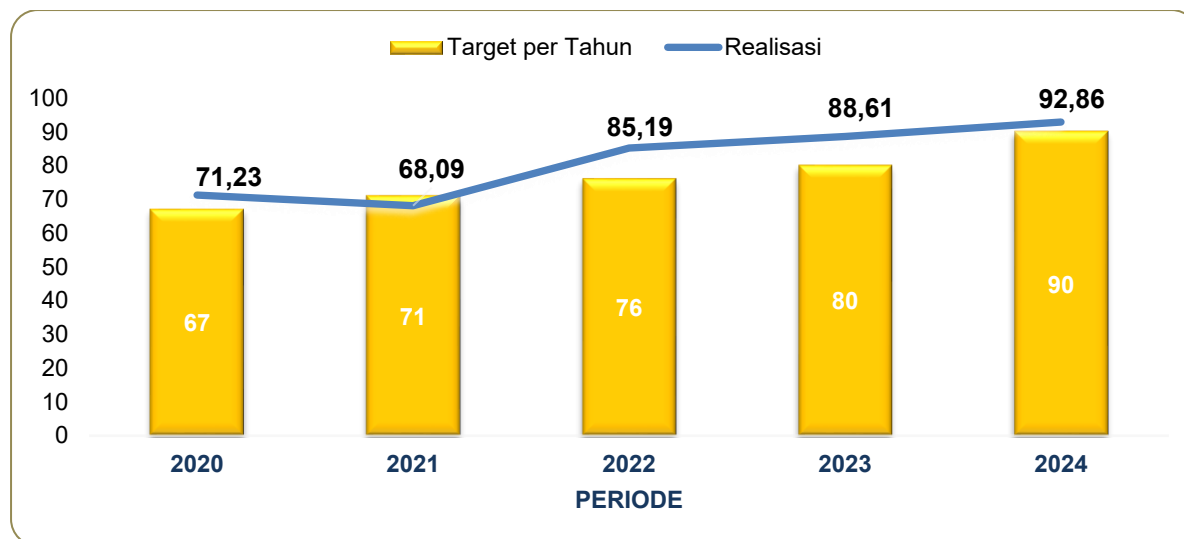


Gambar 1. 15 Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

BBPOM di Manado melakukan evaluasi penilaian sertifikasi meliputi pelayanan terkait rekomendasi/sertifikasi CPPOB, CPOTB, dan CDOB, Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Impor, Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ekspor dan Pelayanan Pengujian Sampel.

IKSK 4.3 memiliki tren peningkatan realisasi dari 98.34 pada tahun 2020 menjadi 100 pada tahun 2024, hal ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Manado dalam memberikan Sertifikat Tepat Waktu karena adanya monitoring yang konsisten terhadap proses penetapan keputusan/rekomendasi yang dihasilkan. Pelaku usaha juga diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan perpanjangan perbaikan apabila perbaikan temuannya tidak memenuhi waktu yang telah disepakati. Upaya pendampingan juga diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan / kendala dalam melakukan CAPA sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/audit yang dilaksanakan oleh BBPOM di Manado sehingga pelaku usaha dapat menyelesaikan CAPA dengan tepat waktu.

IKSK.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan



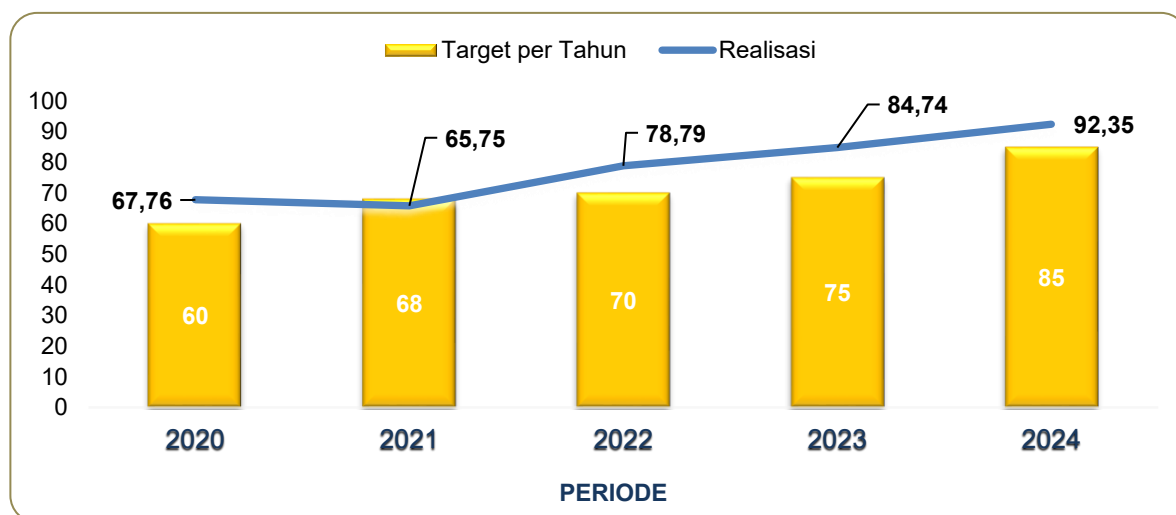
Gambar 1. 16 Tren Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024

Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan merupakan bentuk kepatuhan para pelaku usaha di bidang produksi Obat dan Makanan. Sarana produksi yang dimaksud adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus seperti unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca, dan instalasi farmasi rumah sakit), sarana produksi Obat Tradisional (Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat

Tradisional (UKOT), dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)), sarana produksi Kosmetik (Industri Kosmetik golongan A dan B), sarana produksi Suplemen Kesehatan (mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber), dan Industri Pangan), dan sarana produksi pangan (sarana produksi MD dan IRTP/UMKM). Namun, tidak seluruh jenis sarana produksi tersebut berada di wilayah kerja BBPOM di Manado, sarana produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Manado adalah sarana produksi pangan olahan (sarana produksi MD dan IRTP/UMKM) dan sarana produksi obat tradisional (Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)).

IKSK 4.4 memiliki tren peningkatan realisasi dari 71.23 pada tahun 2020 menjadi 88.61 pada tahun 2023, dengan rata-rata capaian 110.76%. Realisasi IKS 4.4 tahun 2024 diperoleh sebesar 92.86 dengan capaian 103.18%. Dari tahun 2020-2024 persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado cenderung fluktuatif. Dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir pengawasan, pembinaan, dan bimbingan yang telah dilaksanakan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Kegiatan-kegiatan tersebut berhasil meningkatkan kesadaran dan komitmen sebagian besar pelaku usaha produksi untuk selalu menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

IKSK 4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

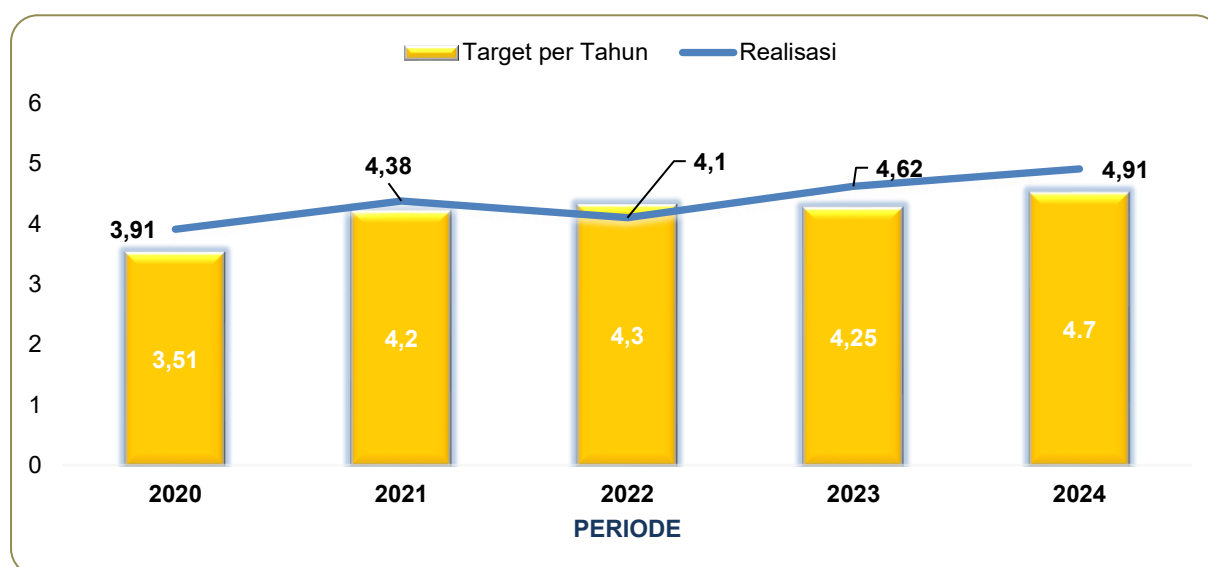


Gambar 1. 17 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan merupakan kepatuhan pelaku usaha di bidang distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado. Perhitungan dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat (Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Provinsi/Kota/Kabupaten, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, serta Klinik), sarana distribusi Obat Tradisional, sarana distribusi Suplemen Kesehatan, sarana distribusi Kosmetik, dan sarana peredaran pangan olahan.

IKSK 4.5 memiliki tren peningkatan realisasi dari 67.76 pada tahun 2020 menjadi 84.74 pada tahun 2023, dengan rata-rata capaian 112.99%. Realisasi IKS 4.5 tahun 2024 diperoleh sebesar 92.35 dengan capaian 108.65%. Dari tahun 2020-2024 persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado cenderung fluktuatif. Dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir telah dilakukan pembinaan yang selama pemeriksaan serta pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten beberapa tahun terakhir sehingga pendekatan ini memastikan bahwa pelaku usaha distribusi memenuhi ketentuan cara distribusi dengan baik.

IKSK.4.6. Indeks Pelayanan Publik

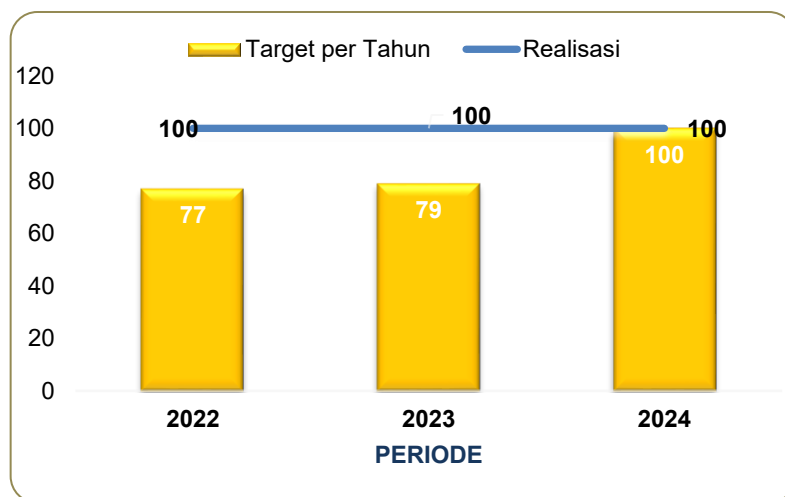


Gambar 1. 18 Tren Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Manado Tahun 2020-2024

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menggunakan 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); (2) Profesionalisme SDM (25%); (3) Sarana Prasarana (18%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan (6) Inovasi (12%).

IKSK 4.6 memiliki tren peningkatan realisasi dari 4.38 pada tahun 2020 menjadi 4.91 pada tahun 2024. Indeks Pelayanan Publik BPOM selama 5 (empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Manado, diantaranya : Monitoring dan evaluasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelayanan publik, digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses, Pendampingan UMKM dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan

IKSK.4.7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik



Gambar 1. 19 Tren Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022-2024

UMKM yang memenuhi standar adalah :

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi:

1. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
2. Untuk UMKM OT:
 - a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
3. Untuk UMKM Kosmetik:
 - a) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)

b) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

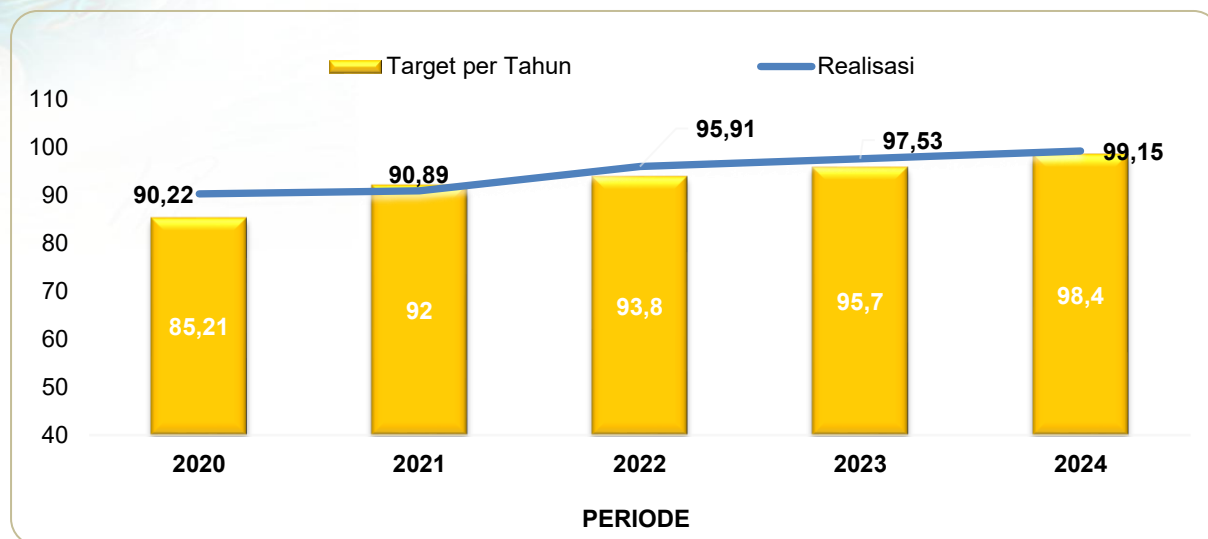
IKSK 4.7 memiliki tren peningkatan realisasi dari 100 pada tahun 2022 menjadi 100 pada tahun 2023, dengan rata-rata capaian 126.58%. Realisasi IKS 4.7 tahun 2024 diperoleh sebesar 100 dengan capaian 100%. Indikator Kinerja Utama ini mulai berlaku pada tahun 2022 – 2024. Dari tahun 2022-2024 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik terus mengalami stagnan. Dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir fasilitator balai bersikap proaktif dengan terus melakukan komunikasi kepada pelaku usaha, koordinasi dengan Dinas PTSP kabupaten/kota, Kantor Pajak dan juga berkonsultasi langsung ke Direktorat terkait di Badan POM. Juga dilakukan fasilitasi sertifikasi dan registrasi kepada pelaku usaha yang didampingi dengan melakukan sampling, pengujian terhadap produk yang akan didaftarkan, pembuatan dokumen-dokumen sebagai persyaratan sertifikasi serta pendampingan pada pembuatan denah / layout produksi. Tujuannya untuk memberikan kepuasan yang sangat baik bagi pelaku usaha

Sasaran Kegiatan (SK 5)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado

Komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado dengan tren NPS naik sejak tahun 2021-2024 hal ini menunjukkan bahwa program komunikasi, informasi dan edukasi terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Utara telah efektif dan memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat dalam turut serta melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan; (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman; (3) Jumlah desa pangan aman; (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

IKSK 5.1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan



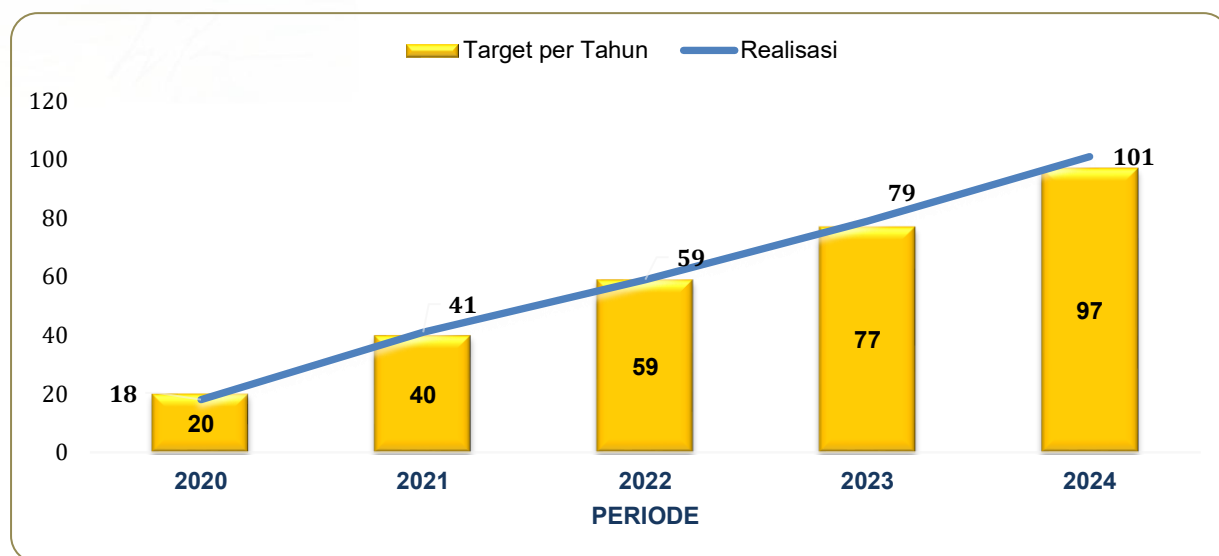
Gambar 1. 20 Tren Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, Balai Besar POM di Manado telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran maupun secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan Balai Besar POM di Manado sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan.

IKSK 5.1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 90.22 pada tahun 2020 menjadi 97.53 pada tahun 2023, dengan rata-rata capaian 101.90%. Realisasi sampai dengan 2024 yaitu 99.15 dengan capaian 100.76%. Kontribusi terbesar peningkatan indeks berasal dari “Minat” yang menunjukkan persepsi minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE Balai Besar POM di Manado. Kontribusi terendah berasal. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap KIE Balai Besar POM di Manado telah dilakukan inovasi KIE berkelanjutan yang lebih mudah dimengerti dan dipahami sesuai karakteristik dan kebutuhan informasi target audiens, evaluasi terhadap konten materi dan konsep kegiatan KIE yang diselenggarakan yang relevan dengan isu Obat dan Makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan budaya dan bahasa setempat yang mudah dipahami. Selain itu pilihan media KIE ditingkatkan dengan mempertimbangkan paparan

media yang banyak diakses target audiens sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat

IKSK-5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman



Gambar 1. 21 Tren Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Tahun 2020-2024

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru dan pengelola kantin sekolah. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, Sosialisasi Keamanan PJAS, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, Sertifikasi PJAS Aman.

IKSS 5.2 memiliki tren peningkatan realisasi dari 18 sekolah pada tahun 2020 menjadi 101 sekolah pada tahun 2024. Realisasi jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman pada tahun 2024 kumulatif jumlah sekolah yang telah diintervensi sejak tahun 2020. Terjadinya pandemi covid-19 sejak Maret 2020 menyebabkan perubahan skala prioritas

oleh pemerintah. Dalam menangani pandemi covid -19 pemerintah melakukan refocusing anggaran dalam menangani covid-19 sehingga terkait hal tersebut maka terjadi pula penyesuaian target pada tahun 2020. Setelah adanya perubahan APBNP 2020 yang ditujukan untuk mengatasi penyebaran covid-19, maka target sekolah tahun 2020 mengalami penyesuaian dari 20 sekolah menjadi 16 sekolah dengan realisasi tahun 2020 sebesar 18 sekolah. Kemudian pada tahun 2021 kekurangan target di sekolah yang diintervensi di Tahun 2020 ditambahkan pada target tahun 2021. Pencapaian akhir periode Renstra 2020-2024 ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Manado yang telah berupaya dalam pengelolaan program Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) Aman yang baik termasuk dalam koordinasi bersama lintas sektor dan menjaga komitmen yang dari pihak sekolah untuk mengimplementasikan program keamanan pangan dengan memberdayakan Kadar Keamanan Pangan Sekolah.

IKSK-5.3 Jumlah desa pangan aman

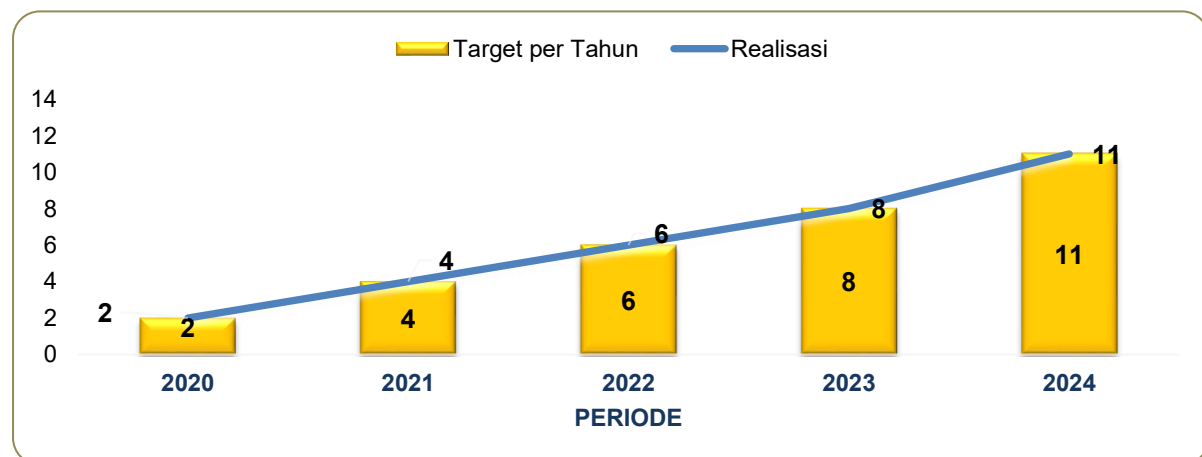


Gambar 1. 22 Tren Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020-2024

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Pangan Aman adalah desa yang memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif, Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

IKSK 5.3 memiliki tren peningkatan realisasi dari 4 desa pada tahun 2020 menjadi 25 desa pada tahun 2023, dengan rata-rata capaian 100%. Realisasi sampai dengan 2024 yaitu 32 desa. Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2024 merupakan kumulatif jumlah desa yang telah diintervensi sejak tahun 2020. Terjadinya pandemi covid-19 sejak tahun 2020 menyebabkan perubahan skala prioritas oleh pemerintah. Dalam menangani pandemi covid-19 pemerintah melakukan refocusing anggaran dalam menangani covid-19 sehingga terkait hal tersebut maka terjadi pula penyesuaian target pada tahun 2020. Setelah adanya perubahan APBDP 2020 yang ditujukan untuk mengatasi penyebaran covid-19, maka target jumlah desa pangan aman tahun 2020 mengalami penyesuaian dari 6 desa menjadi 4 desa. Kemudian selisih 2 desa tersebut dimasukkan dalam target tahun 2021 sehingga menjadi 8 desa yang diintervensi selama tahun 2021. Pencapaian akhir periode Renstra 2020-2024 ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Manado yang telah berupaya dalam pengelolaan program Desa Pangan Aman yang baik termasuk dalam koordinasi bersama lintas sektor dan pemanfaatan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa sekaligus membentuk desa pangan aman. Hal ini dibuktikan melalui penghargaan kepada Desa Utaurano sebagai Juara 2 Regional Timur Lomba Desa Pangan Aman

IKSK-5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas



Gambar 1. 23 Tren Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020-2024

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari

sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar

IKSK 5.4 memiliki tren peningkatan realisasi dari 2 pasar pada tahun 2020 menjadi 11 pasar pada tahun 2024. Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2024 merupakan kumulatif jumlah pasar yang telah diintervensi sejak tahun 2020. Pencapaian akhir periode Renstra 2020-2024 ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Manado yang telah berupaya dalam pengelolaan program PPABK yang baik termasuk dalam koordinasi bersama lintas sektor dan pemanfaatan peran kader dan pengelola pasar untuk mewujudkan pasar pangan yang aman. Hal ini dibuktikan melalui penghargaan yang diperoleh Balai Besar POM sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengelola Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Terbaik Tahun 2024 dan Penghargaan Pasar Tomohon sebagai Juara 2 Regional Timur Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Sasaran Kegiatan (SK 6)

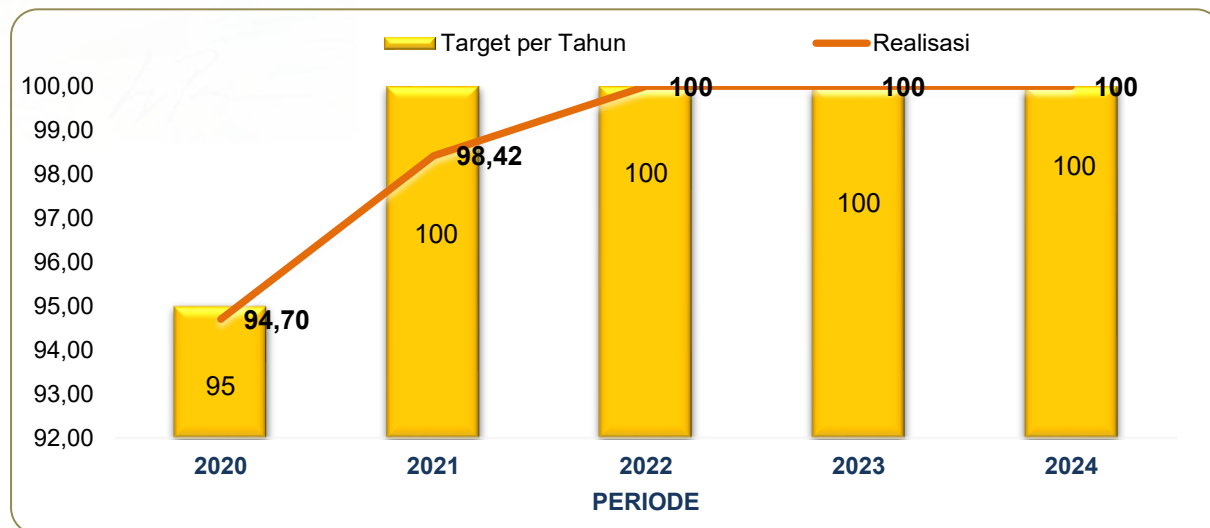
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado

Balai Besar POM di Manado melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Sulawesi Utara. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado memiliki tren NPS yang cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, namun pada akhir tahun 2023-2024 mengalami pencapaian maksimal, hal ini dikarenakan upaya yang BBPOM di Manado lakukan dalam menjamin keamanan dan kualitas produk beredar dipasaran telah efektif. Partisipasi industri dan masyarakat juga merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini. Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa

dan diuji sesuai standar; (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

IKSK-6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

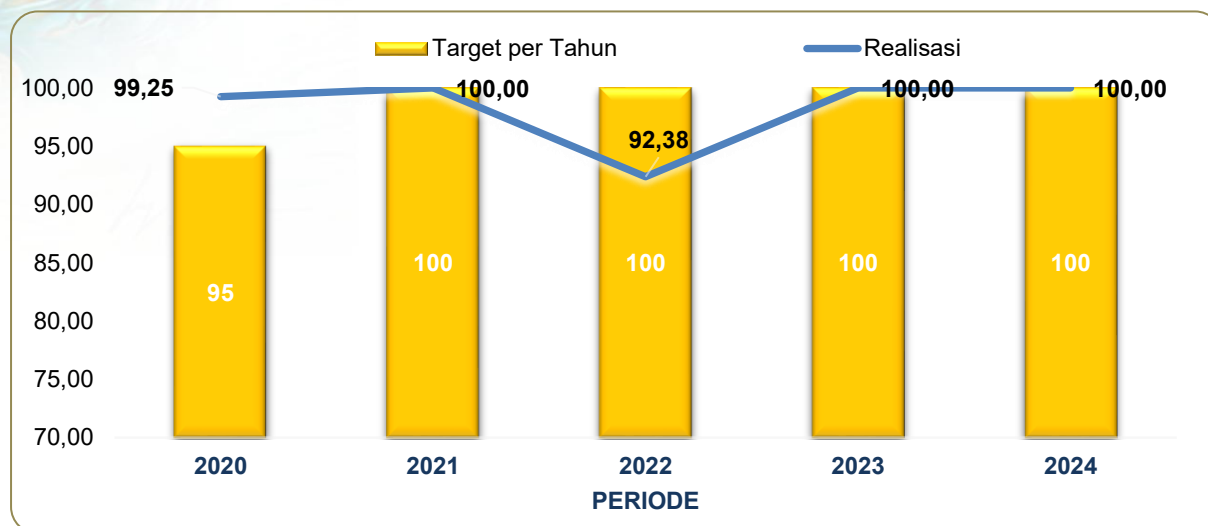


Gambar 1. 24 Tren Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

IKSK 6.1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 94.70% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam perencanaan serta strategi pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling tahun 2024, pengadaan kebutuhan operasional pengujian, penambahan instrument pengujian instrument dasar maupun spesifik dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang baik sehingga seluruh sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dapat diperiksa dan diuji sesuai standar.

IKSK-6.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 1. 25 Tren Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label sampel makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari Balai Besar POM di Manado atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

IKSK 6.2 memiliki tren peningkatan realisasi dari 99.25% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2023, dengan rata-rata capaian 99.37%. Realisasi sampai dengan tahun 2024 yaitu 100%. Adanya perencanaan dan strategi yang baik sehingga seluruh sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dapat diperiksa dan diuji sesuai standar. Strategi yang telah dilakukan antara lain pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling tahun 2024, pengadaan kebutuhan operasional pengujian, penambahan instrument pengujian baik instrument dasar maupun spesifik dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi.

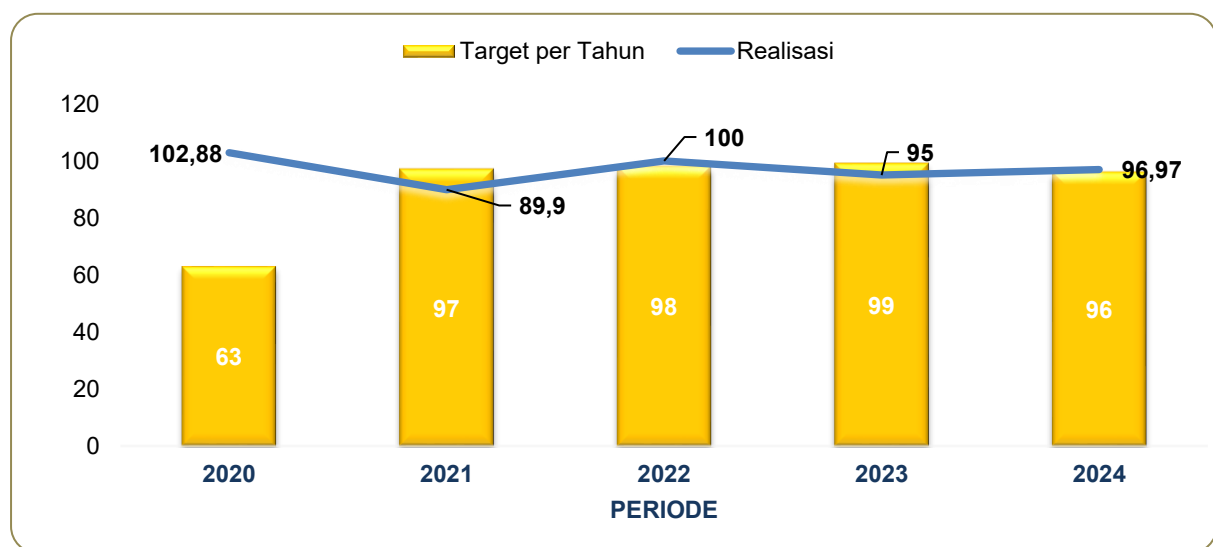
Sasaran Kegiatan (SK 7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Balai Besar POM di Manado harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Sulawesi Utara. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara maka BBPOM di Manado dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan tren fluktuatif sejak tahun 2020-2024, mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 namun mengalami kenaikan NPS. Keberhasilan penindakan Obat dan Makanan bergantung pada sinergi regulasi yang kuat serta partisipasi masyarakat dan industri. Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

IKSK-7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



Gambar 1. 26 Tren Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan yang diawali dari penyelidikan hingga penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 7 (tujuh) Per Undang-Undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi hukum materil yang diampu Badan POM.

Kegiatan penindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut tata caranya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan terjadi, dan guna menemukan kebenaran dalam suatu perkara.

Perkara di bidang Obat dan Makanan merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. Dalam penanganan perkara, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui. Tahapan yang menjadi acuan perhitungan dalam indikator ini adalah tahap II yang merupakan proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

IKSK 7.1 memiliki tren fluktuatif realisasi dari 102.88% pada tahun 2020 menjadi 95.00% pada tahun 2023, dengan rata-rata capaian 110.80%. Realisasi tahun 2024 diperoleh sebesar 96.97% dengan capaian 101.01%. Dari data tahun 2020-2024 tersebut dapat dilihat bahwa IKSK 7.1 telah mencapai target yang ditetapkan namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: (1) Proses penyidikan memerlukan waktu yang tidak terukur karena dipengaruhi oleh kompleksitas perkara; (2) perkara tidak dapat selesai dalam periode tahun yang sama yang kemudian menyebabkan *carry over* pada tahun selanjutnya.

Sasaran Kegiatan (SK 8)

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Manado yang optimal

Sejalan dengan pengarus utamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 BBPOM di Manado berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Manado akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

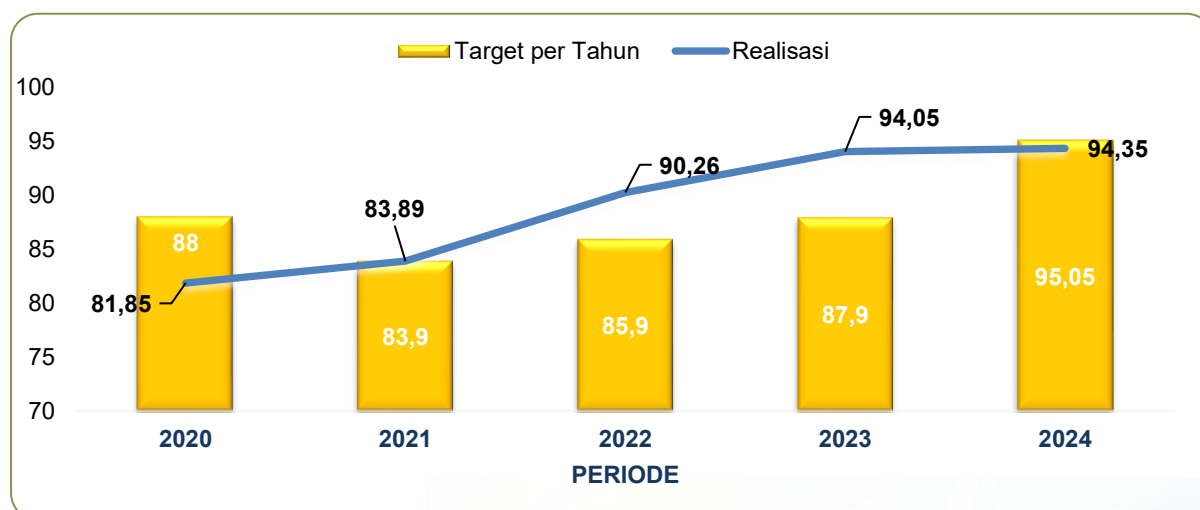
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, BBPOM di Manado berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya

internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BBPOM di Manado agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Terwujudnya SDM BBPOM di Manado yang berkinerja optimal dengan tren NPS fluktuatif sepanjang 5 tahun terakhir, NPS tahun 2024 mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya perubahan instrument pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dimana pegawai yang dinilai untuk pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 adalah PNS dan PPPK, dimana rata-rata pegawai belum mengikuti diklat fungsional, kemudian adanya perubahan yang mana nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi serta perubahan dimensi kualifikasi

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Indeks RB Balai Besar POM di Manado; (2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Manado

IKSK 8.1 - Indeks RB Balai Besar POM di Manado



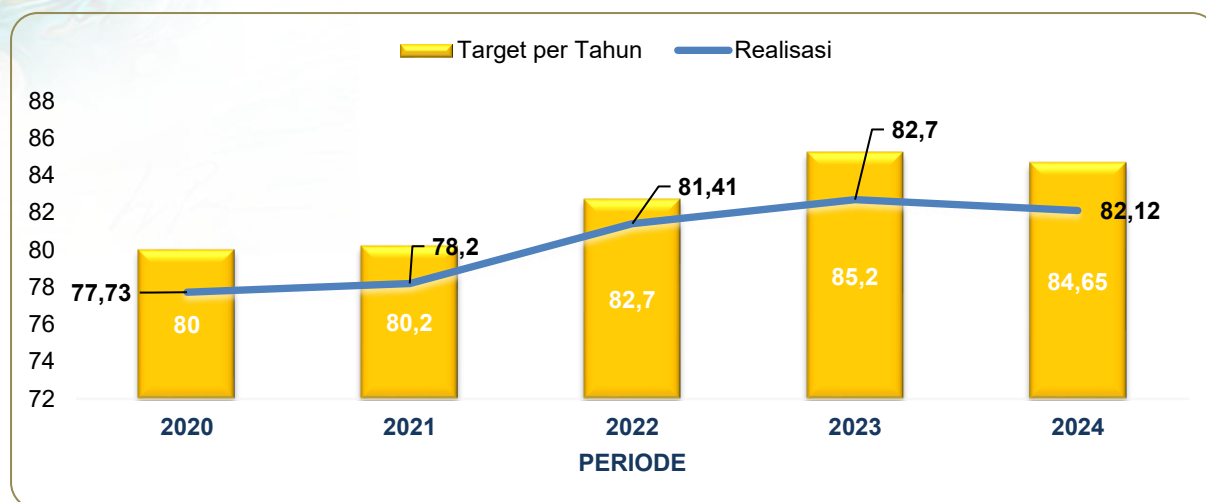
Gambar 1. 27 Tren Indeks RB BBPOM di Manado Tahun 2020-2024

Nilai RB Balai Besar POM di Manado diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Mulai Tahun 2023 terdapat perbedaan evaluasi RB dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan PerMenPAN RB No. 9/2023, terdapat dua jenis Evaluasi RB, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Keluaran dari evaluasi eksternal adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang di dalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga.

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024; Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

IKSK 8.1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 81.85 pada tahun 2020 menjadi 94.35 pada tahun 2024, dengan rata-rata capaian 100.87%. Tahun 2024 IKS 8.1 tidak mencapai target, namun dari data 2020-2024 terdapat peningkatan *trend* Indeks RB Balai Besar POM di Manado. Balai Besar POM di Manado telah melakukan Pembangunan ZI secara konsisten dan berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar POM di Manado telah memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

IKSK 8.2 - Nilai AKIP Balai Besar POM di Manado



Gambar 1. 28 Tren Nilai AKIP Tahun 2020-2024

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.

IKSK 8.2 1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 77.73 pada tahun 2020 menjadi 82.12. Nilai AKIP menunjukkan kinerja instansi pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Meskipun tren nilai AKIP meningkat dari tahun ke tahun, realisasi sempat menurun di tahun 2024 dan masih belum mencapai target yang ditetapkan sepanjang periode Renstra 2020-2024. Ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) sebagai dua faktor penting dalam pencapaian target. Beberapa aspek yang dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan target yang ditetapkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kinerja dinilai baik adalah penetapan target yang cukup tinggi karena hal ini juga dapat menciptakan gap jika sumber daya, strategi, atau implementasi tidak sepenuhnya selaras dengan target yang ditetapkan, meskipun digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan sudah diterapkan, masih terdapat ruang untuk optimalisasi dalam penggunaan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi, Kualitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan prinsip reformasi

birokrasi serta akuntabilitas kinerja juga menjadi faktor penting baik dari sisi evaluator mau pengelola akuntabilitas Balai Besar POM di Manado. Strategi yang bisa dilakukan diantaranya meninjau kembali target yang ditetapkan agar lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas organisasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi dengan memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan data dan informasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan menerapkan strategi yang tepat diharapkan dapat semakin meningkatkan terwujudnya tata Kelola pemerintahan serta dapat mencapai nilai AKIP yang lebih optimal.

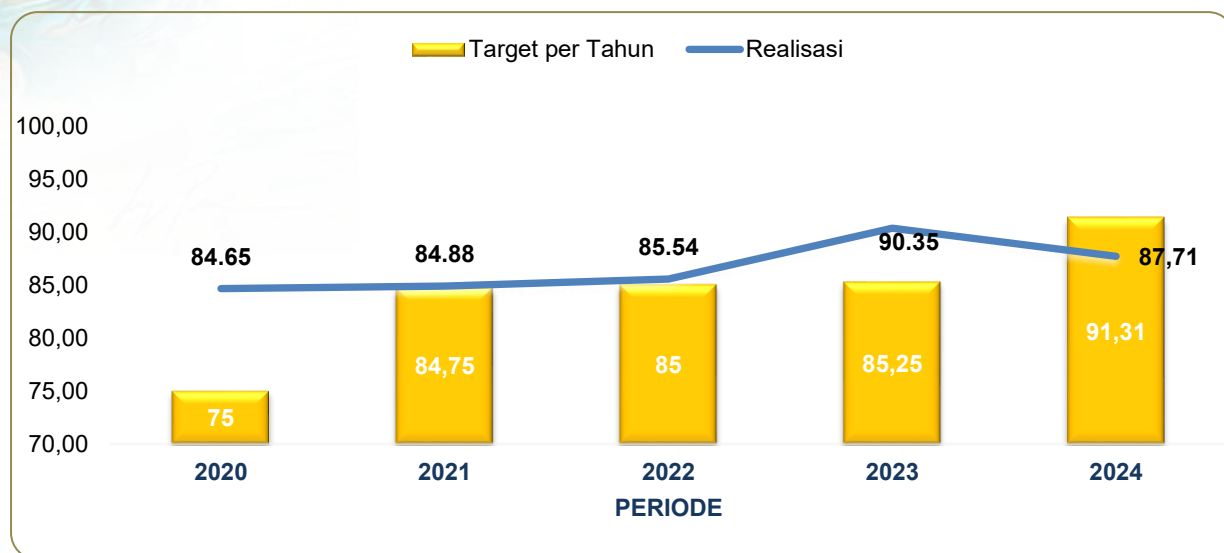
Sasaran Kegiatan (SK 9)

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Manado yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Terwujudnya SDM BBPOM di Manado yang berkinerja optimal dengan tren NPS fluktuatif sepanjang 5 tahun terakhir, NPS tahun 2024 mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya perubahan instrument pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dimana pegawai yang dinilai untuk pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 adalah PNS dan PPPK, dimana rata-rata pegawai belum mengikuti diklat fungsional, kemudian adanya perubahan yang mana nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi serta perubahan dimensi kualifikasi. Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Manado

IKSK 9.1 - Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Manado



Gambar 1. 29 Tren Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Manado Tahun 2020-2024

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran IP ASN menggunakan 4 Dimensi, yaitu: Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin.

IKSK 9.1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 84.65 pada tahun 2020 menjadi 87.71 pada tahun 2024, ketidaktercapaian target 2024 disebabkan karena terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

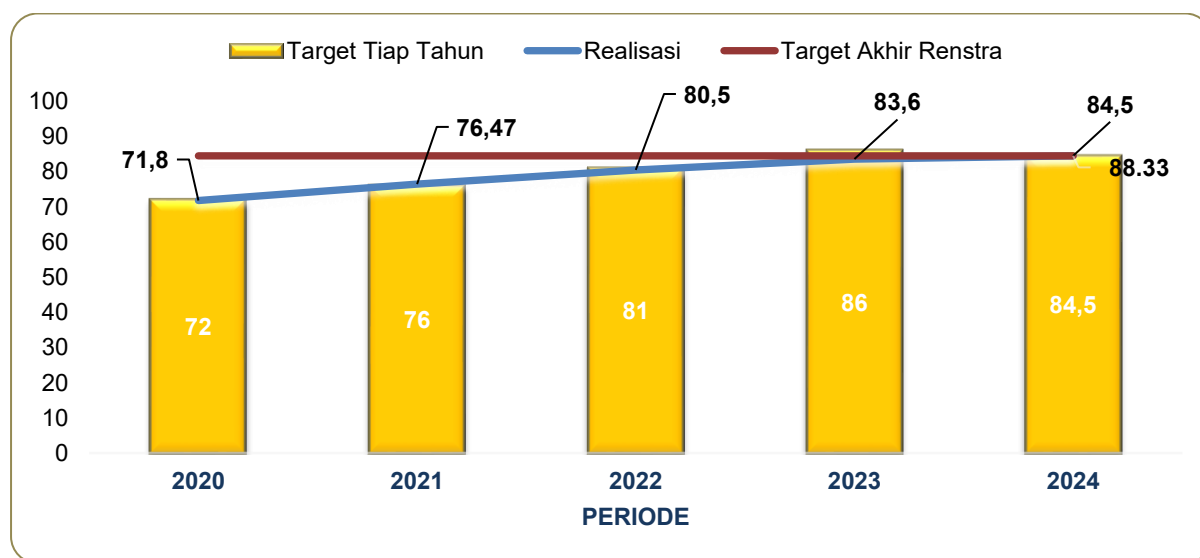
Sasaran Kegiatan (SK 10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait

pengawasan obat dan makanan. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS yang relative fluktuatif selama lima tahun terakhir namun cenderung optimal hal ini ditunjukkan melalui realisasi 2 (dua) indikator pembentuk NPS yang mengalami kenaikan sepanjang lima tahun yang disebabkan karena adanya pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian, terpenuhinya peralatan laboratorium serta terlaksananya peningkatan kompetensi sesuai penugasan pengujian, selain itu pencapaian ini juga tidak terlepas dari pemanfaatan dan pemutakhiran data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan secara optimal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Manado. Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Manado yang optimal.

IKSK 10.1 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP



Gambar 1. 30 Tren Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2020-2024

GLP/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Penguji. Pemenuhan laboratorium

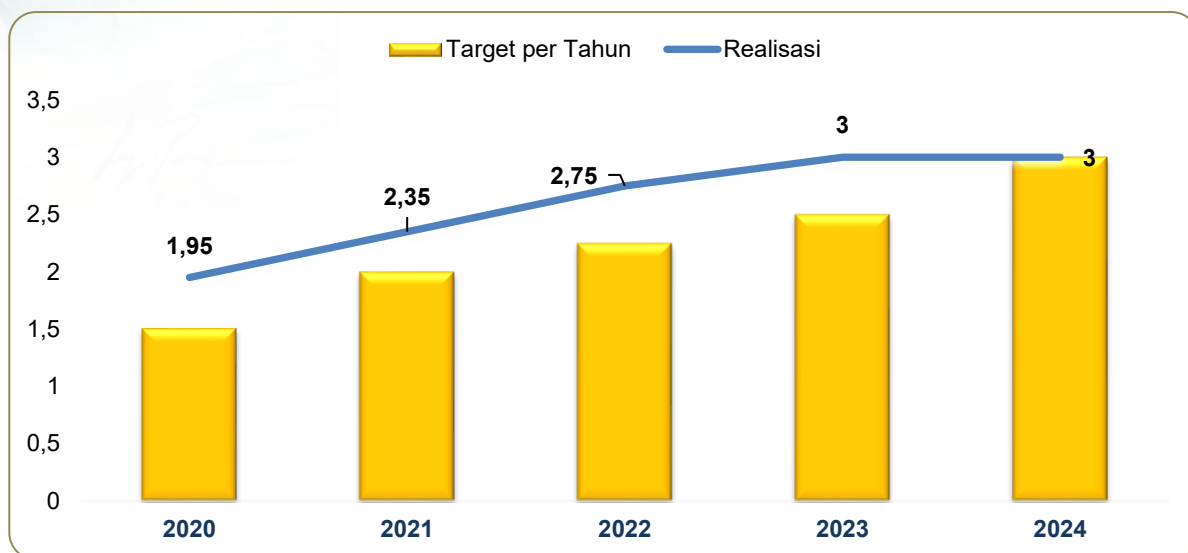


BPOM terhadap SKL dihitung berdasarkan nilai SKL Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dan Nilai SKL Balai Besar/Balai POM.

IKSK 10.1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 71.80% pada tahun 2020 menjadi 8 pada 88.33% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa laboratorium Balai Besar POM di Manado telah memenuhi standar ruang lingkup, peralatan, dan kompetensi penguji. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya laboratorium BPOM, pengawasan post market, kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM, serta untuk mendukung daya saing produk Obat dan Makanan, maka pada tahun 2022 BPOM telah memberlakukan konsep “Regionalisasi Laboratorium” Dimana Balai Besar/Balai POM dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) regional berdasarkan kedekatan geografis, kemudahan transportasi untuk pengiriman sampel dan ketersediaan jaringan internet, yaitu Regional Padang, Regional Pekanbaru, Regional DKI Jakarta, Regional Denpasar, Regional Samarinda, Regional Makassar dan Regional Manado.

Pada tahun 2023, konsep Regionalisasi Laboratorium BPOM disempurnakan dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional di setiap regional, sedangkan Balai Besar/Balai POM anggota melakukan pengujian dasar. Melalui pengelompokan tersebut diharapkan kapasitas dan kapabilitas pengujian unggul laboratorium BPOM dapat terfokus dan terarah. Selain itu penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium anggota sesuai dengan tugas dan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan sampai tahun 2024, antara lain: (i) pemenuhan standar ruang lingkup pengujian melalui uji profisiensi; (ii) identifikasi dan pemenuhan kebutuhan baku pembanding, suku cadang dan reagen; (iii) pemenuhan standar peralatan laboratorium dan pemenuhan standar kompetensi.

IKSK 10.2 - Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Manado yang optimal



Gambar 1. 31 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Manado yang Optimal Tahun 2020-2024

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM adalah Mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email, sharing folder, dashboard BCC pimpinan, dan berita aktual pada subsite balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan (dihitung dari traffic pengiriman dan penerimaan email) oleh unit kerja, bidang/bagian/maupun individu. Pemanfaatan sharing folder melihat jumlah akses pemanfaatan sharing folder dalam satu bulan. Pemanfaatan dashboard BCC pimpinan, dihitung terhadap intensitas login (40%) dan pemanfaatan data pada dashboard BCC (60%).

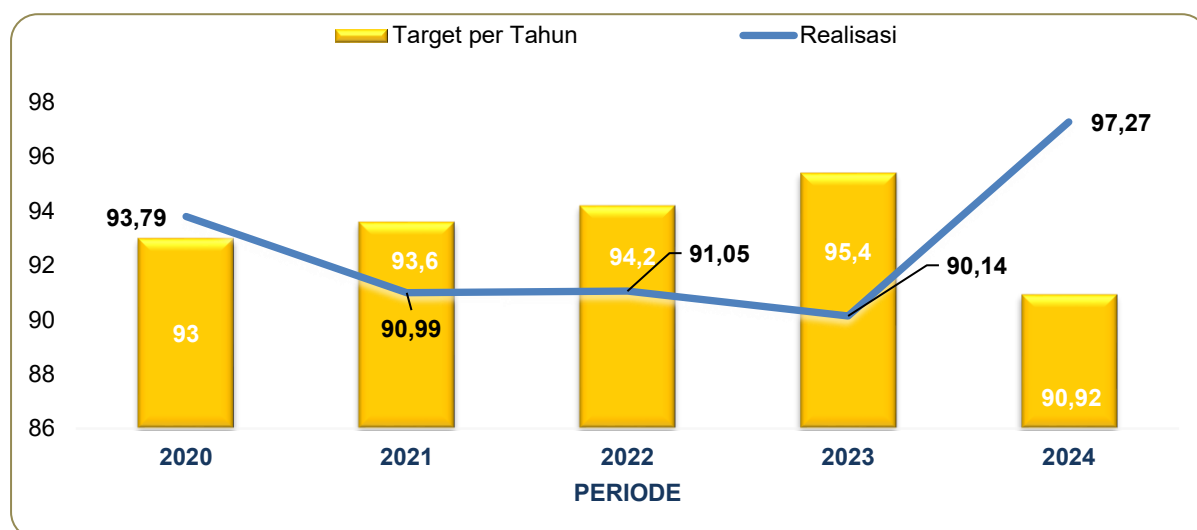
IKSK 10.2 memiliki tren peningkatan realisasi dari 1.95 pada tahun 2020 menjadi 3 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Hal ini menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Balai Besar POM di Manado telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan sangat baik.

Sasaran Kegiatan (SK 11)

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Manado secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Manado dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Manado secara Akuntabel, NPS tahun tahun 2023 merupakan nilai terendah, hal ini disebabkan karena adanya deviasi Halaman III DIPA Tahun 2023 masih dikarenakan dalam penyusunan RPD yang tidak dapat dilakukan penyesuaian atau pemutakhiran pada triwulan 4 tahun 2023 dikarenakan proses pengesahan revisi anggaran terkait usulan tambahan anggaran belanja pegawai BPOM baru selesai pada tanggal 17 Oktober 2023. NPS Tahun 2024 merupakan nilai tertinggi di sepanjang 5 (lima) tahun anggaran, keberhasilan pencapaian menunjukan BBPOM di Manado telah menagawal melakukan perbaikan terus menerus untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Manado.

IKSK-11.1 Nilai Kinerja Anggaran BPOM



Gambar 1. 32 Tren Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Manado Tahun 2020-2024

Nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

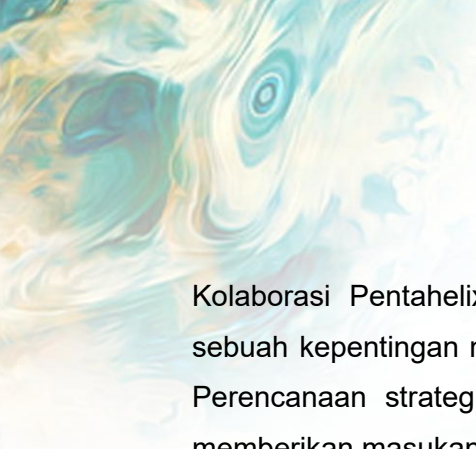
IKSK 11.1 memiliki tren peningkatan realisasi dari 93.79 pada tahun 2020 menjadi 97.27 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan walaupun dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan yang sangat dinamis, Balai Besar POM di Manado tetap berkomitmen melakukan pengelolaan anggaran yang bersih dan akuntabel dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan melalui perolehan Piagam Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Tahun 2024 Kategori Sangat Baik oleh KPPN Manado.

I.1.2 Aspirasi Stakeholder

Tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai Besar POM di Manado memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan Obat dan Makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai Besar POM di Manado sebagai UPT di daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Balai Besar POM di Manado untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan Obat dan Makanan bukanlah tugas yang statis; ia memerlukan adaptasi dan inovasi terus menerus. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Balai Besar POM di Manado dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.



Kolaborasi Pentahelix dimana seluruh lapisan yang saling bersinergi dalam menangani sebuah kepentingan melalui akademisi, masyarakat, pelaku usaha, pemerintah dan media. Perencanaan strategis kolaboratif memungkinkan semua orang dalam suatu komunitas memberikan masukan untuk mengembangkan rencana dan memfasilitasi perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Salah satu forum keterlibatan dari pemangku kepentingan yang rutin telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado adalah Forum Konsultasi Publik (FKP). Tujuan utama dari ini FKP adalah untuk menampung dan memprioritaskan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui komunikasi dua arah, Aspirasi masyarakat juga membantu Balai Besar POM di Manado dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi Obat dan Makanan. Hal ini penting agar Balai Besar POM di Manado dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Beberapa poin penting yang telah teridentifikasi dalam FKP yaitu bahwa akademisi memiliki proyek *base learning* yang dapat mengikutsertakan mahasiswa dalam pengawasan Obat dan Makanan, masukan bahwa alur layanan Surat Keterangan Impor dan Ekspor yang mudah diakses oleh publik, peningkatan sosialisasi di masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak tentang edukasi Obat dan Makanan aman secara rutin, pemberian ruang bagi media dalam pemberitaan publik terkait kejahatan di bidang Obat dan Makanan, peningkatan koordinasi lintas sektor terkait penyelidikan kasus KLB.

Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado 2025-2029. Perencanaan yang matang dan profesional merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan baik, sinergis, dan terarah. Dengan melakukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengidentifikasi prioritas yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan Obat dan Makanan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Balai Besar POM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk Obat dan Makanan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman Kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai Besar POM di Manado dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai Besar POM di Manado dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk Obat dan Makanan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai Besar POM di Manado diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk Obat dan Makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai Besar POM di Manado tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam

memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai Besar POM di Manado menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai Besar POM di Manado periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai Besar POM di Manado serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan obat dan makanan untuk masyarakat.

I.2.1 Kekuatan (Strength)

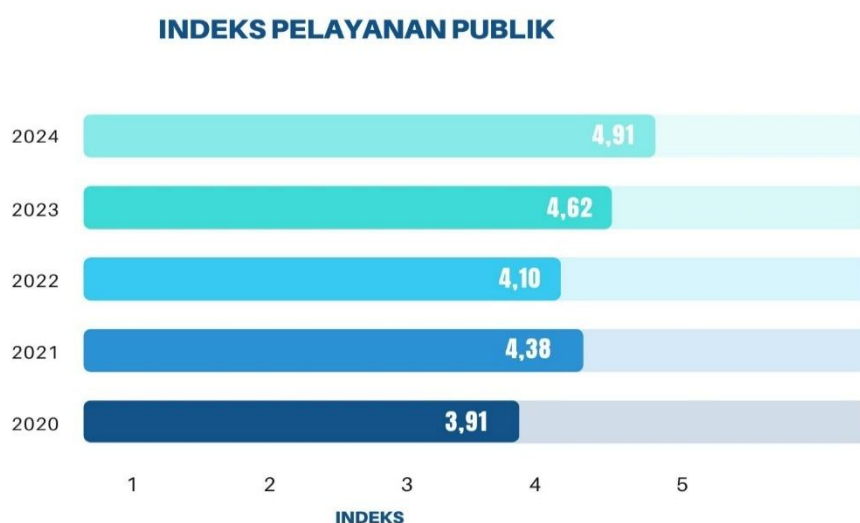
Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai Besar POM di Manado, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai Besar POM di Manado keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai Besar POM di Manado di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Manado, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Kualitas Pelayanan Publik yang semakin prima

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat dan peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang prima adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik secara efisien, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi antara penyelenggara pelayanan dan penerima layanan, menciptakan kepercayaan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam pemerintahan dan Pembangunan. Pelayanan yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansi terkait. Oleh

karena itu, penting bagi administrasi publik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan meresponsnya dengan tindakan yang tepat.

Budaya organisasi yang diterapkan Balai Besar POM di Manado mendukung nilai-nilai positif seperti profesional, integritas, kredibel, kerjasama, dan responsif dapat membentuk perilaku petugas yang sejalan dengan tujuan pelayanan prima. Kepemimpinan yang inspiratif dan mendukung juga memainkan peran penting dalam mendorong perilaku positif. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas, sehingga mereka mampu memberikan layanan yang berkualitas. Sistem *reward* dan *punishment* yang adil dan transparan juga dapat memotivasi petugas untuk bekerja dengan baik dan berperilaku positif.



Gambar 1. 33 Nilai Indeks Pelayanan Publik 2020-2024

Melihat dari tren data dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM Manado pada periode tahun 2020 hingga 2024, penurunan pada Tahun 2022 terjadi karena pelayanan setelah terjadinya pandemi covid -19 terjadi pergeseran dan peningkatan ekspektasi dan pemahaman masyarakat terkait BPOM dan Pengawasan Obat dan Makanan. Namun sepanjang 4 tahun terakhir memiliki tren kenaikan.

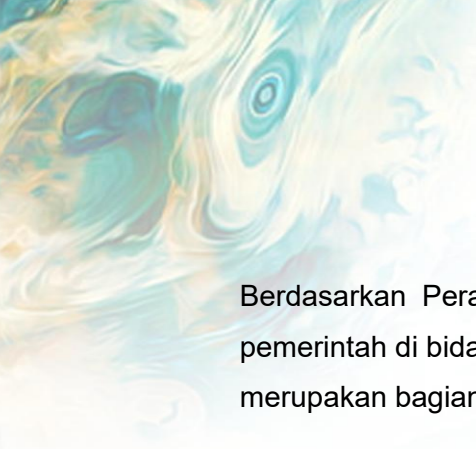
Pelayanan prima atau yang sering disebut dengan istilah "*service excellence*," yang telah dicapai Balai Besar POM di Manado adalah standar pelayanan yang tidak hanya

memenuhi tetapi juga melampaui harapan masyarakat. Untuk mencapai pelayanan prima, diperlukan keterampilan, komitmen, dan, yang terpenting, perilaku yang mencerminkan dedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan prima tidak dapat tercapai tanpa adanya perilaku positif dan proaktif dari petugas Balai Besar POM di Manado yang melibatkan diri dalam proses pelayanan.

Pada Tahun 2023 Balai Besar POM di Manado mendapatkan apresiasi penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apresiasi tertinggi dalam Pembangunan Zona Integritas ini merupakan wujud nyata upaya kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Atas hal tersebut Balai Besar POM di Manado berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkelanjutan dan mendorong Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di sekitar, Apresiasi juga diberikan kepada Balai Besar POM di Manado atas Inovasi aplikasi Sistem Pelayanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga “SIMPEL SAMPEL” bahwa Inovasi Direplikasi di Tingkat Nasional, kemudian pada Tahun 2024 Balai Besar POM di Manado juga mendapatkan Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta masuk dalam Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkup K/L, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2025 Berdasarkan Efisiensi Anggaran melalui Inovasi Pintu Mapalus Kawanua (Sistem Pelayanan Kemandirian dan Pendampingan Pelaku Usaha Melalui Kolaborasi Pengawasan UMKM Berdaya Saing, dalam rangka penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak Perempuan, anak, serta penyandang disabilitas Balai Besar POM di Manado menghadirkan Inovasi PEKA MELATI (Penyediaan Pelayanan Kelompok Rentan dengan Melayani Sepenuh Hati) melalui inovasi Balai Besar POM di Manado mendapatkan penghargaan Top Inovasi Kompetisi Inovasi (KOIN) di Lingkungan BPOM Tahun 2025.

2. Sistem Pengawasan *Full Spectrum*

BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan tersebut, BPOM melaksanakan Tugas pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia.

Balai Besar POM di Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah melakukan pengawasan *full spectrum* terhadap Obat dan Makanan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup pengawasan pada seluruh tahap siklus hidup produk Obat dan Makanan, mulai dari produksi (*pre-market*), distribusi (*post-market control*) yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Balai Besar POM di Manado diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Kewenangan ini tidak hanya memberikan Balai Besar POM di Manado kekuatan untuk mengatur dan mengawasi, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai Besar POM di Manado untuk secara efektif melakukan inspeksi dan evaluasi produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Kapasitas ini bukan hanya memperkuat posisi Balai Besar POM di Manado dalam ekosistem kesehatan masyarakat tetapi juga menegaskan komitmen lembaga terhadap perlindungan konsumen. Dengan penguatan terus-menerus dari kerangka regulasi dan pengawasan, Balai Besar POM di Manado memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang Obat dan Makanan.

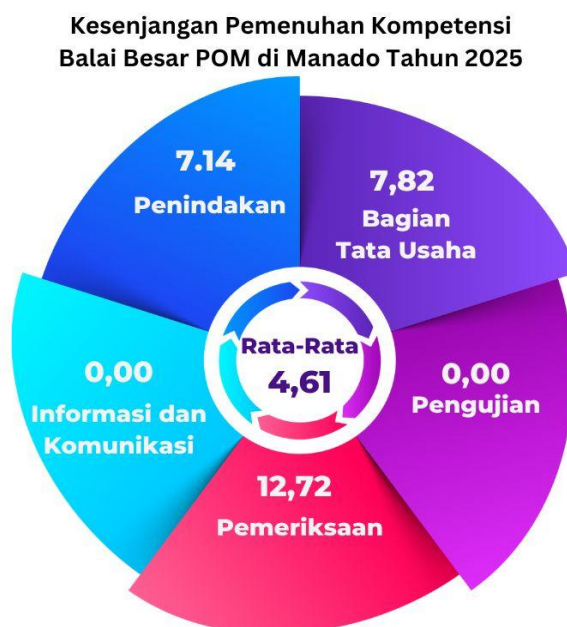
Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik

Pengawasan *full spectrum* di Balai Besar POM di Manado didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mendukung setiap tahapan pengawasan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur aspek keamanan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat; Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur pengelolaan pangan untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi;

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang penetapan keamanan, mutu, dan perizinan terkait Obat dan Makanan; Peraturan BPOM digunakan sebagai panduan teknis untuk produsen, distributor, dan pihak terkait. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Balai Besar POM di Manado untuk melakukan pengawasan, termasuk tindakan hukum terhadap pelanggaran.

3. Kompetensi sumber daya manusia yang optimal

Balai Besar POM di Manado didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Obat dan Makanan bagi masyarakat. Melalui berbagai program pengembangan kapasitas, seperti pelatihan teknis, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi dan kegiatan *transfer of knowledge* terus secara berkesinambungan terus ditingkatkan agar selaras dengan kebutuhan organisasi. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, serta nilai-nilai integritas, profesioanlisme dan adaptasi dalam bekerja kualitas sumber daya manusia di Balai Besar POM di Manado mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Hal ini selaras dengan data hasil pemetaan kompetensi di Balai Besar POM di Manado menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kemampuan yang mendekati standar jabatan dengan rata-rata kesenjangan pemenuhan kompetensi Balai Besar POM di Manado Tahun 2025 sebesar 4.61% dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 1. 34 Rekapitulasi Kesenjangan Pemenuhan Kompetensi Tahun 2025

Tabel 1. 3 Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

UPT	Tingkat Pendidikan						
	S3	S2	Apt	S1 Lain	D3	SMA Sederajat	Total
Balai Besar POM di Manado							
Kepala		1					1
Bagian TU				19	5	3	25
Fungsi Pengujian		2	9	22	2	1	36
Fungsi Pemeriksaan		5	3	5		1	14
Fungsi Penindakan		1	3	3			7
Fungsi Informasi dan Komunikasi		1	2	2		1	6
TOTAL		10	17	51	7	6	91

Berdasarkan data kepegawaian, Jumlah SDM Balai Besar POM di Manado yang aktif sampai dengan November 2025 sebanyak 91 pegawai terdiri dari 28 pegawai laki-laki (30.68%) dan 63 pegawai perempuan (69.32%). Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Balai Besar POM di Manado memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sejumlah 56 pegawai (61.54%), diikuti Profesi sebanyak 16 pegawai (17.58%), D3 sebanyak 7 pegawai (7.69%), non sarjana sebanyak 4 pegawai (4.40%), untuk S2 sejumlah 8 pegawai (8.79%)

Balai Besar POM di Manado secara konsisten mengikuti penilaian, pengembangan, dan sertifikasi kompetensi SDM. Hasil penilaian kompetensi periode 2025 yang telah dilaksanakan pada triwulan 3 Tahun 2025 dilakukan terhadap PNS dan P3K sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) SDM Balai Besar POM di Manado dinyatakan kompeten sesuai standar yang ditetapkan.

Hingga periode November 2025, BBPOM di Manado telah mengikut sertakan SDM-nya melalui berbagai jenis pelatihan, yaitu Pelatihan Teknis sebanyak 91 peserta, Pelatihan Fungsional yang telah diikuti oleh seluruh pejabat fungsional, serta Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan untuk struktural BBPOM di Manado. Selain itu, tercatat 91(Sembilan

puluh satu) peserta mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis, kursus dan lainnya yang mencakup pelatihan teknis pendukung tugas, penguatan kapasitas umum, serta internalisasi nilai-nilai organisasi dan secara total sebanyak 100 (seratus diklat teknis) telah dilaksanakan untuk seluruh pegawai Balai Besar POM di Manado dan 352 (tiga ratus lima puluh dua) pelatihan lainnya yang telah dilaksanakan di Balai Besar POM di Manado, selain itu Balai Besar POM di Manado pada 2025 mengikut sertakan sebanyak 4 orang pegawai dalam pelaksanaan tugas belajar dan rincian sebagai berikut 1 pegawai S2 dan 3 pegawai S1

Profesionalisme dan dedikasi SDM Balai Besar POM di Manado telah membangun reputasi lembaga sebagai pilar keandalan dan kepercayaan dalam pengawasan produk di Indonesia, memastikan bahwa hanya produk yang aman dan berkualitas yang tersedia untuk masyarakat. Komitmen ini memacu Balai Besar POM di Manado untuk terus berinovasi dan mengadopsi teknologi serta metodologi pengawasan terbaru, menjaga lembaga ini tetap unggul dalam menjawab dinamika tantangan yang terus berkembang dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan.

4. Infrastruktur dan Fasilitas Laboratorium yang memadai

Balai Besar POM di Manado dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pengawasan yang memadai memiliki peranan penting dalam mendukung operasional Balai Besar POM di Manado yang efektif dan efisien. Infrastruktur Balai Besar POM di Manado terdiri dari berbagai elemen fisik seperti kantor yang berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengambilan keputusan strategis yang dilengkapi dengan fasilitas area pelayanan publik, ruang rapat, serta fasilitas pendukung pendukung lainnya yang mempermudah koordinasi, Kompetensi Laboratorium Pengujian dapat ditunjukkan melalui Akreditasi Laboratorium Pengujian sesuai ISO/IEC oleh Komite Akreditasi Nasional yang telah terakreditasi sebagai Laboratorium Penguji dengan Nomor Akreditasi LP-232-IDN. Setiap laboratorium pengujian harus menerapkan sistem manajemen mutu yang tergambar dalam terpeliharanya akreditasi laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017. Tuntutan masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan yang semakin tinggi menuntut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui perpanjangan tangan UPT di daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium sebab hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menjawab tuntutan diperlukan instrument dengan teknologi yang kompleks Laboratorium Balai Besar POM di Manado telah dilengkapi dengan peralatan modern untuk analisis dan pengujian produk seperti Cytotoxic Cabinet yang digunakan untuk fasilitas pengujian obat antineoplastik (obat kemoterapi), Dosage Unit Sampling Apparatus (DUSA) For Inhaler Testing MDI + DPI, High Pressure Ion Chromatography (HPLC), LCMS/MS Triple Quadrupole, Spectrofluorometer, fasilitas pengujian bioteknologi dengan standar laboraorium BSL – 2 yang selama ini digunakan untuk pengujian DNA dan pengujian sampel specimen COVID – 19 serta pengujian sterilitas dengan menggunakan isolator, selain itu terdapat pula Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh Balai Besar POM di Manado untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Melalui kolaborasi yang erat antara UPT dan laboratorium utama, Balai Besar POM di Manado memperkuat jaringan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pengawasan didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat, mendukung komitmen Balai Besar POM di Manado dalam menjaga standar Kesehatan masyarakat yang tinggi. Kebijakan ini termasuk di dalamnya pengawalan keamanan pangan pada Program MBG melalui kegiatan sampling dan pengujian yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Manado.

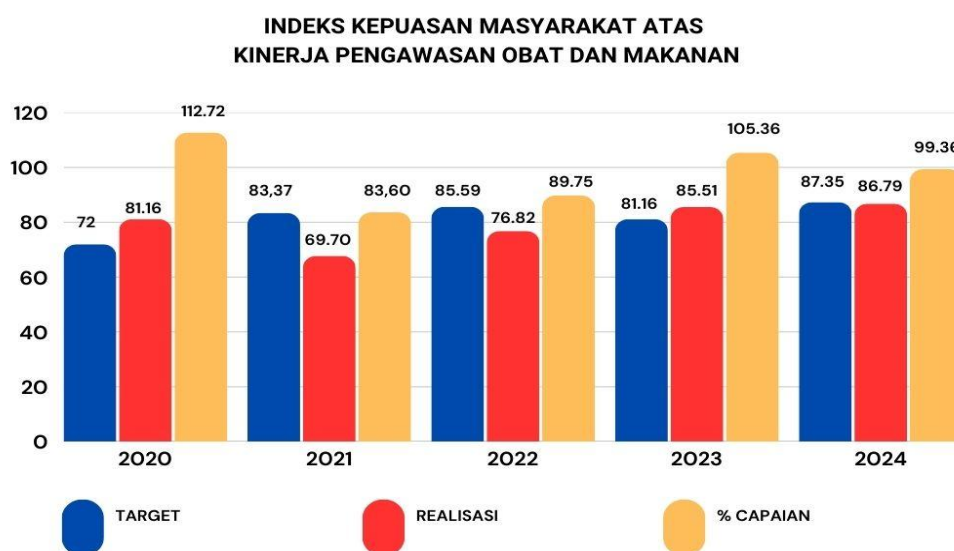
I.2.2 Weakness

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai Besar POM di Manado tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai Besar POM di Manado menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai Besar POM di Manado dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan

yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Manado, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan yang masih kurang

Kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan diukur dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya dari kepuasan masyarakat yang diukur melalui Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. pengawasan Obat dan Makanan. Variabel pembentuk indeks kepuasan mengikuti Konsep Service Quality (ServQual) yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan yaitu: Upaya **pengawasan** yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, upaya dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan Kesehatan dengan **pemberian informasi** terkait keamanan dan mutu produk, Perhatian BPOM terhadap **jaminan keamanan** Produk yang beredar di masyarakat dengan pemberian nomor izin edar dan pengujian produk dan **Tindakan** yang dilakukan BPOM dengan menarik produk yang berbahaya atau kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat



Gambar 1. 35 Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif namun cenderung meningkat pada realiasi Tahun 2021-2024. Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2024 berdasarkan komoditi di Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah responden sebanyak 430 yaitu 1) Obat 87.21; 2) Obat Tradisional 86.25; 3) Suplemen Kesehatan 86.25; 4) Kosmetik 86.63 dan 5) Pangan Olahan 86.98; **melebihi rata-rata indeks nasional di semua komoditi** yaitu 1) Obat 85.15; 2) Obat Tradisional 83.03; 3) Suplemen Kesehatan 83.13; 4) Kosmetik 83.37; dan 5) Pangan Olahan 84.29. Capaian realiasi indeks kepuasan tahun 2024 **diatas realisasi indeks tahun 2023** di semua komoditi.

Jumlah capaian responden di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 430 orang dari responden seluruh Provinsi Indonesia sebanyak 20.610 yang merepresentasikan sejumlah 187.676.223 penduduk dewasa Indonesia yang berusia 17 - 65 tahun (Proyeksi Penduduk 2024 - BPS) dengan response rate 99.95%. Responden terpilih mewakili 60.19% wilayah urban/perkotaan dan 39.81% rural/perdesaan. Karakteristik responden terdiri dari 50.57% laki-laki dan 49.43% perempuan dengan mayoritas berada pada rentang usia 36-50 tahun (34.46%). Tingkat pendidikan responden terbanyak yaitu SLTA/ sederajat (45.07%). Sedangkan jenis pekerjaan responden 3 (tiga) terbanyak adalah Ibu Rumah Tangga (29.65%), Pegawai/Karyawan (23.45%), dan Wiraswasta (21.82%). Tahun 2024 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Manado berdasarkan hasil pengukuran survei yang oleh Pusat Analisis kebijakan Obat dan Makanan di Manado sebesar 86.79 dengan rincian nilai indeks Kepuasan Masyarakat per variabel adalah sebagai berikut : (1) Upaya Pengawasan sebesar 86.26; (2) Upaya Penindakan sebesar 87.53; Upaya Pemberian Informasi sebesar 86.28; Upaya Penindakan sebesar 87.10.

Dari data diatas menunjukan Balai Besar POM di Manado perlu : (1) meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum , terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan peningkatan penindakan produk ilegal di pasar *offline* dan *online*; (2) Meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi pada berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado melalui berbagai media; (3) Meningkatkan

Kerjasama dengan media dalam publikasi aktivitas Pengawasan Obat dan Makanan; (4) Meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut media sosial yang dimiliki.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja pengawasan Balai Besar POM di Manado, termasuk strategi komunikasi yang telah dilakukan, serta sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Balai Besar POM di Manado dan para pemangku kepentingan. Untuk memenuhi harapan masyarakat di masa mendatang salah satu poin penting yang muncul adalah perlunya Balai Besar POM di Manado untuk terus meningkatkan strategi komunikasi agar lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka.

2. Beban Kerja yang belum merata

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM perlu perkuatan SDM Balai Besar POM di Manado baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan Balai Besar POM di Manado Tahun 2025, kebutuhan SDM Balai Besar POM di Manado sebanyak 107 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 91 orang (Sumber *SIASN Per 06 November 2025*). Persentase pemenuhan SDM Balai Besar POM di Manado sampai dengan saat ini 85.05%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 16 orang. Beberapa strategi pemenuhan SDM telah dilakukan Balai Besar POM di Manado diantaranya pelaksanaan seleksi terbatas dari PNS Eksternal di luar Badan POM, serta usulan CASN PPPK ke Biro SDM.



Gambar 1. 36 Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Manado v.s Jumlah Eksisting (Data SIASN per 06 November 2025)

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung tujuan organisasi, kinerja pegawai mempunyai peran yang sangat penting. Kinerja pegawai sendiri sangat berkaitan dengan beban kerja. Ketidakeimbangan beban kerja dalam suatu organisasi



dapat berdampak pada kepuasan kerja pegawai sehingga berpotensi menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, dimana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban kerja sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Ketidakmerataan beban kerja pegawai ini dilatarbelakangi oleh perbedaan kompetensi pegawai. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

3. Masih besarnya kesenjangan kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Saat ini para Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk dapat cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan di internal maupun eksternal. Dengan berbagai perubahan yang sangat cepat dan masif, idealnya ASN tidak hanya cepat merespon, namun lebih jauh lagi dapat memprediksi perubahan di masa depan dan menciptakan inovasi yang dapat melebihi ekspektasi pada pemangku kepentingannya. Situasi demikian membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

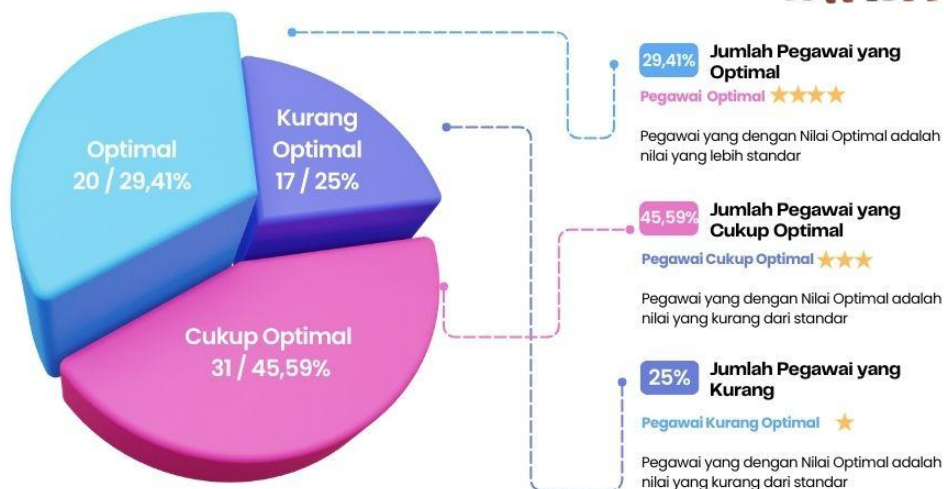
Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme ASN dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen ASN diperlukan standar kompetensi jabatan, yang terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural

Kompetensi merupakan salah satu pilar dalam sistem merit yang menjadi basis penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, selain kualifikasi dan kinerja. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan agar seorang pegawai dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

DATA KOMPETENSI SDM BALAI BESAR POM DI MANADO

SDM Balai Besar POM di Manado yang memiliki data Kompetensi terkini

68
Pegawai



Gambar 1. 37 Proporsi Pemenuhan Standar Kompetensi

Berdasarkan penilaian kompetensi yang telah dilakukan pada Tahun 2025, tercatat 20 (dua puluh) atau 29.41% orang pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi, sementara 48 (empat puluh delapan) atau 70.59% orang pegawai belum memenuhi standar kompetensi. Kesenjangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pegawai di Balai Besar POM di Manado memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural ini sangat berhubungan dengan kemampuan komunikasi, Kerjasama tim, kemampuan memecahkan masalah dengan baik, kemampuan mengambil keputusan secara tepat dan cepat serta seberapa cepat seorang pegawai dapat beradaptasi menghadapi perubahan kemampuan beradaptasi Diperlukan penguatan kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang di dukung dengan kebijakan organisasi.

4. Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi

Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi yang terjadi di Balai Besar POM di Manado dapat memicu masalah serius terkait dengan kontinuitas dan kualitas pekerjaan. Ketika

pegawai dengan pengetahuan dan pengalaman spesifik dipindahkan ke posisi lain tanpa pengganti yang memadai, terjadi kekosongan dalam pengetahuan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dalam unit kerja yang ditinggalkan dan memerlukan waktu penyesuaian bagi pengganti untuk mencapai tingkat keahlian yang sama.

Berdasarkan data hingga 2025 terdapat 2 pegawai yang berasal seleksi terbatas dari PNS Eksternal Badan POM, selain itu terdapat beberapa posisi jabatan yang digeser disebabkan oleh adanya mutasi ataupun promosi pegawai 1 posisi Kepala Bagian Tata usaha, 1 orang pegawai dengan jabatan Pengawas Farmasi pada Fungsi Penindakan, dan 1 posisi yang sedang berproses mutasi ke unit kerja lain dengan jabatan Perencana Ahli Muda serta adanya 2 rotasi pegawai antar fungsi pada posisi jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dan perpindahan jabatan dari Analis Anggaran Ahli Muda

Dampak dari mutasi/rotasi/perpindahan jabatan pegawai yang sering dan cepat ini menciptakan risiko lain berupa hilangnya pengetahuan dan permasalahan dalam mentransfer informasi penting antara pegawai. Tanpa transisi yang memadai dan dokumentasi prosedur yang efektif, pengalaman dan pengetahuan spesifik yang telah dibangun oleh pegawai lama dapat hilang, menimbulkan kelemahan dalam struktur pengawasan Balai Besar POM di Manado. Kelemahan ini bukan hanya berpengaruh pada pekerjaan harian, tetapi juga pada kemampuan Balai Besar POM di Manado untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, yang sangat penting dalam lingkungan pengawasan obat dan makanan yang dinamis dan seringkali kritis.

5. Dukungan IT yang masih kurang optimal

Perkembangan IT saat ini menjadi salah satu pendorong dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem teknologi informasi (TI) yang saat ini dimiliki saat ini belum terintegrasi secara optimal. Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk

kesalahan, dan mengancam integritas serta keamanan data yang dikelola, yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

1.2.3 Opportunity

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai Besar POM di Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Manado untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Tuntutan/ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Balai Besar POM di Manado

Meningkatnya kesadaran dan ekspektasi masyarakat terhadap keamanan, mutu dan manfaat Obat dan Makanan menjadi peluang strategis Balai Besar POM di Manado untuk memperkuat peran sebagai UPT pada lembaga pengawas Obat dan Makanan. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel mendorong Balai Besar POM di Manado untuk terus berinovasi dalam system pengawasan dan pelayanan. Fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi, pengembangan system pelayanan berbasis digital, serta memperkuat kemitraan dengan lintas sektor dalam mendukung pengawasan terpadu. Semakin tinggi tuntutan publik terhadap kualitas layanan, semakin besar pula peluang bagi Balai Besar POM di Manado untuk menunjukkan kinerja optimal yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Dukungan Stakeholder dan Suprasistem

Tujuan pembangunan kesehatan yaitu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan dapat dicapai, dengan pengelolaan kesehatan yang dilakukan secara terpadu, dengan mengerahkan semua sumber daya dan melibatkan kerja sama lintas sektor. Obat dan Makanan merupakan komponen penting, karena terkait masalah keamanan dan kesehatan manusia untuk jangka pendek maupun jangka panjang,

sehingga mensyaratkan suatu standar dan persyaratan tertentu untuk dapat diedarkan di masyarakat.

Dalam pelaksanaan program-program Pengawasan Obat dan Makanan perlu adanya koordinasi lintas sektor dan tata hubungan kerja untuk efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan oleh karena itu diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor sebagai upaya meningkatkan sinergitas dan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dari hulu ke hilir. untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Peluang Balai Besar POM di Manado untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, institusi akademik serta pemerintah daerah dan suprasistem menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan Obat dan Makanan, sementara kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan koordinasi dimaksud yaitu mengkoordinasikan tugas teknis pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan, mengkoordinasikan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada Obat dan Makanan, menerapkan system informasi database dan penerbitan ijin operasional berupa sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan dan Obat Tradisional Yang Baik dengan berpedoman pada system yang dikembangkan oleh Badan POM, melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait Obat dan Makanan kepada masyarakat dan Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Rapat koordinasi Tim koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan paling 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;

Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan pemerintah daerah dan suprasistem dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan Balai Besar POM di Manado sebagai UPT BPOM di daerah untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

3. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG merupakan payung koordinatif yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik pusat maupun daerah, dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Melalui Peraturan Presiden ini BPOM diberikan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya terkait pengawalan aspek keamanan pangan khususnya pengawasan bahan baku berupa pangan olahan; pengawasan sarana produksi dan distribusi; dan pengawasan makanan bergizi secara gratis. Dukungan kebijakan ini memberikan peluang besar bagi Balai Besar POM di Manado. Kebijakan ini membuka ruang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keamanan, mutu, dan gizi pangan yang disalurkan melalui program MBG. Balai Besar POM di Manado dapat berperan aktif dalam aspek pengawasan pangan olahan, pembinaan pelaku usaha pangan lokal, serta edukasi masyarakat mengenai pangan aman dan bergizi. Selain memperkuat implementasi program MBG di Sulawesi Utara, peluang ini juga mendukung peningkatan peran Balai Besar POM di Manado sebagai lembaga yang memastikan MBG berkualitas dan aman dikonsumsi.

I.2.4 Threats

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai Besar POM di Manado. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai Besar POM di Manado dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen "Threats" yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Obat dan makanan merupakan komponen penting dalam Sistem Kesehatan Nasional. Penggunaan obat dan makanan perlu mempertimbangkan aspek keamanan, mutu, khasiat/manfaat, dan gizi. Aspek biaya juga perlu menjadi pertimbangan, dikarenakan obat menyumbang tingginya pengeluaran belanja kesehatan suatu negara. Peredaran obat dan makanan harus diawasi secara ketat melalui upaya pengawasan pre-market



dan post-market. Namun demikian, masih banyak ditemukan kasus terkait peredaran dan penggunaan obat dan makanan ilegal.

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi Balai Besar POM di Manado dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika

tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*.

Dengan demikian, Balai Besar POM di Manado dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Rendahnya Kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan

Balai Besar POM di Manado merupakan UPT BPOM yang menjalankan fungsi pengawasan post-market setelah produk beredar termasuk melakukan tindak lanjut pengawasan berupa pemberian sanksi administratif. Walaupun sudah diberlakukan kebijakan sanksi administratif namun pelanggaran di bidang obat dan makanan masih

terus terjadi. Faktor kurangnya pengetahuan terhadap suatu peraturan memunculkan sikap dan keyakinan pada pelaku usaha bahwa yang dilakukannya bukanlah suatu pelanggaran terhadap peraturan. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan persepsi yang ada pada diri pelaku usaha yang mendasari munculnya suatu sikap dan keyakinan pada dirinya, adanya permintaan dari banyak konsumen merupakan peluang untuk dapat menaikkan penjualan sehingga berpengaruh positif pada pendapatan perusahaan, Ketidakpedulian terhadap peraturan ini dimanifestasikan dalam perilaku malas dan faktor kesibukan pada pekerjaan lain. Banyaknya produk beredar yang produksinya bukan wilayah Provinsi Sulawesi Utara menjadi sebuah tantangan dan ancaman dimana Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan agar pelaku usaha memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) semakin kecil.

3. Penilaian masyarakat terhadap kinerja pengawasan Balai Besar POM di Manado dalam menghadapi VUCA

Kondisi lingkungan sekarang ditandai dengan VUCA, yaitu kondisi yang dinamis, dimana perubahan sangat cepat terjadi dan penuh ketidakpastian, sementara society 5.0 adalah konsep dimana kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT) dan big data dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam menjawab adanya VUCA. Dengan hadirnya VUCA dan society 5.0 menimbulkan tantangan baru yang menjadi keseriusan di semua bidang. Kemajuan digital menjadi tantangan tersendiri. Tantangan serius yang dihadapi di era ini termasuk keterbelakangan ekonomi, ketidakmampuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, ketidakseimbangan struktural, produktivitas yang tidak merata, Tantangan VUCA dalam era digital yang terus berkembang, penting untuk mempertimbangkan kemajuan teknologi dengan pertimbangan menciptakan masyarakat digital yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, membutuhkan upaya kolaboratif dari individu, komunitas, bisnis, dan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang mengatasi akar penyebab masalah. Tantangan VUCA ini mendorong Balai Besar POM di Manado untuk memperkuat kapasitas organisasi terutama dalam hal kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi serta koordinasi lintas sektor. Dengan merespon dinamika VUCA, Balai Besar POM di Manado dapat tetap tangguh dan responsif dalam melaksanakan

fungsi pengawasan Obat dan Makanan, serta memberikan pelayanan publik yang adaptif dan terpercaya ditengah perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang.

4. Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance (AMR))

Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah: terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian. Selain itu, hal ini juga akan berdampak bagi meningkatnya beban biaya kesehatan bagi pemerintah. Bagi BPOM, AMR bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga merupakan tantangan lintas sektor yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pengawasan akan menjadi kunci. Langkah strategis yang harus dilakukan antara lain meliputi: (a) penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotic dan antimikroba lainnya, termasuk pelacakan residu pada produk pangan; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan one health bersama kementerian terkait, pelaku usaha, dan masyarakat; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu produk obat dan pangan yang beredar serta (e) edukasi dan komunikasi risiko yang masif kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba. Tanpa penguatan peran BPOM sebagai garda depan pengawasan obat dan makanan, AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia. Balai Besar POM di Manado harus mampu menjawab tantangan ini melalui kegiatan-kegiatan : Advokasi Lintas Sektor Terkait Pengendalian Resistensi Antimikroba, melakukan KIE terhadap masyarakat terkait pengendalian resistensi antimikroba; Kegiatan Pemeriksaan Sarana Apotek, Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada tenaga kefarmasian dan petugas pengawas, Publikasi Hasil Pengawasan Apotek yang Menyerahkan Antibiotik tanpa Resep Dokter.

5. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG

Dalam implementasi Program MBG di Provinsi Sulawesi Utara, salah satu ancaman strategis yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya risiko terjadinya insiden/Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini melibatkan rantai yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Skala yang besar dengan pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai distribusi yang belum seragam di seluruh wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap insiden keamanan pangan/KLB KP. Insiden keamanan pangan/KLB KP dapat terjadi akibat kontaminasi dari pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai standar. Selain berdampak langsung terhadap penerima manfaat, insiden semacam ini dapat menimbulkan implikasi sosial yang luas, seperti turunnya tingkat kepercayaan publik, terganggunya proses pembelajaran, hingga berkurangnya legitimasi program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, isu ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga ancaman strategis terhadap ketahanan program MBG itu sendiri. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Manado sebagai UPT Badan POM memiliki peran vital dalam mengawal keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko.

Tabel 1. 4 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

ANALISA SWOT



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

II.1 Visi

Balai Besar POM di Manado sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029, yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat

bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu “**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas**”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi diatas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya..

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi danPangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata Kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM di Manado sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

II.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa..
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Besar POM di Manado sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan tujuan BPOM.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut.:

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

NO	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

NO	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang						
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

II.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Manado, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Manado akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak

memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum

menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Manado periode 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut.

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai Besar POM di Manado 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai Besar POM di Manado untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai Besar POM di Manado sebagaimana tercantum dalam tabel :

Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Manado

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba.	1. Pemantauan penggunaan antibiotik di masyarakat, 2. Sosialisasi Anti Microbial Resistance kepada pelaku usaha. 3. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye nasional terkait penggunaan antibiotik yang bijak. 4. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Pembinaan secara langsung terkait penyusunan CAPA/TPP kepada Penanggung Jawab dan atau pelaku usaha, sekaligus melakukan follow up CAPA/TPP 2. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan. 3. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	Fungsi Pemeriksaan
		Rendahnya pelaku usaha dalam menindaklanjuti Rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	1. Peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha. 2. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek.	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			3. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, Pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	
		Belum terpenuhinya komponen standar kemampuan laboratorium -mencakup ruang lingkup pengujian, kecukupan peralatan, kompetensi petugas, dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	1. Penyusunan rencana pemenuhan bertahap terhadap standar ruang lingkup dan peralatan laboratorium sesuai kebutuhan prioritas dan ketersediaan anggaran 2. Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan peralatan laboratorium 3. Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi petugas laboratorium melalui pelatihan teknis, uji profisiensi, dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang pengujian	Fungsi Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Masih tingginya peredaran produk Sediaan Farmasi yang tidak sesuai standar	1. Fokus dalam pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian rutin ditingkatkan dalam pengawasan dalam hal pengelolaan Obat yang berpotensi disalahgunakan. 2. Pelaksanaan Intensifikasi Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan 3. Intensifikasi pengawasan kosmetik	Fungsi Pemeriksaan Penindakan
		Peningkatan kasus Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan di Wilayah Sulawesi Utara	1. Pembentukan Tim Gerak Cepat lintas sektor terkait 2. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi	Fungsi Pengujian dan Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			cemaran dan penanganan KLB KP. 3. Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Kepatuhan pelaku usaha Pangan Fortifikasi yang rendah terhadap pemenuhan aspek CPPOB.	1. Inspeksi berkala ke produsen produk pangan olahan fortifikasi 2. Pembinaan dan pendampingan teknis melalui Bimbingan Teknis CPPOB bagi pelaku usaha Sarana Produksi Pangan Fortifikasi secara berkala serta Kolaborasi dengan lintas sektor terkait	Fungsi Pemeriksaan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Penyebaran KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Utara dan kelompok sasaran secara optimal	1. Meningkatkan kompetensi petugas dalam menyampaikan materi, 2. Peserta yang menjadi target survei harus tepat sasaran	Fungsi Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			3. Metode penyampaian yang menarik, 4. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana memadai. 5. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam	1. Pendampingan/ desk untuk registrasi akun dan produk 2. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam. 3. Pembentukan fasilitator di UPT dalam pendampingan UMKM OBA dan Kosmetik. 4. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progress pendampingan UMK	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
5	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Intervensi Pihak Eksternal Terhadap Penanganan TP Obat dan Makanan	Setiap Tahapan Penyelidikan digelar untuk dapat menilai fakta dan temuan kasus secara objektif	Fungsi Penindakan
		Kalah dalam Gugatan praperadilan penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Peningkatan kompetensi PNS Balai Besar POM di Manado dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 2. Penyidik yang bertugas lebih dari satu yang berjenjang dalam jabatan. 3. Melaksanakan Gelar Kasus dan Gelar Perkara. 4. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/ Tinggi/ Negeri	Fungsi Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	Petugas menerima suap dari pelaku usaha untuk membantu melakukan take down akun penjualan saingan bisnisnya	1. Laporan patroli siber diverifikasi secara berjenjang. 2. Sistem pelaporan suap/WBS (Mo Tangka).	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	yang efektif di wilayah kerja UPT		3. Pendelegasian tugas lebih dari satu orang.	
		Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	1. Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi 2. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber 3. Penguatan dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan	Fungsi Penindakan
7	Layanan publik UPT yang prima	Kesalahan dalam penyampaian informasi ke publik baik informasi tidak tepat atau sudah tidak terkini	1. Proses evaluasi berjenjang terkait berita/Hasil Konten/Draft Berita/Infografis/Script Naskah Videografis yang sifatnya memerlukan kajian terhadap isu di masyarakat 2. Mempercepat permohonan informasi atau isu yang tidak memerlukan kajian dapat dipercepat perilisannya 3. Peningkatan kompetensi	Fungsi Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			pegawai petugas layanan publik	
		Pemberitaan terkait kinerja BPOM di berbagai media, baik cetak, online, elektronik dan media sosial bertonasi negatif	Menyebarkan informasi kegiatan strategis BPOM kepada media dan lebih terbuka kepada media	Fungsi Infokom dan Bagian Tata Usaha
		Menurunnya kepuasan Masyarakat karena kurang memadainya sarana dan prasarana (fasilitas)	Pemenuhan standar sarana prasarana pelayanan Publik	Fungsi Infokom dan Bagian Tata Usaha
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Monitoring/ Pelaporan implementasi saluran pengaduan MO TANGKA 2. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat. 3. Sosialisasi ke eksternal terkait integritas pegawai Balai Besar POM di Manado 4. Penggalangan komitmen terhadap risiko	Seluruh Fungsi/Bagian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			benturan kepentingan	
		Risiko terjadi tanpa adanya pencegahan atau perbaikan	Pembuatan wadah untuk memberikan masukan terhadap resiko-resiko yang ada melalui Inovasi Tarsius	Tim Manajemen Risiko
		Tidak tercapainya target kinerja dan tujuan organisasi	1. Pembuatan tools untuk pengendalian dan pelaporan berkala 2. Mendorong pengendalian dan pencapaian kinerja melalui inovasi Diki Mo Lapor 3. Melakukan rapat evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala 4. Menyusun Laporan Kinerja sesuai pedoman dan tepat waktu 5. Mengekskalasikan risiko ke Badan POM terkait belum terintegrasikan nya data pengawasan pada aplikasi SIPT ke dalam aplikasi pelaporan kinerja yang digunakan di lingkungan BPOM	Seluruh Fungsi/Bagian

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

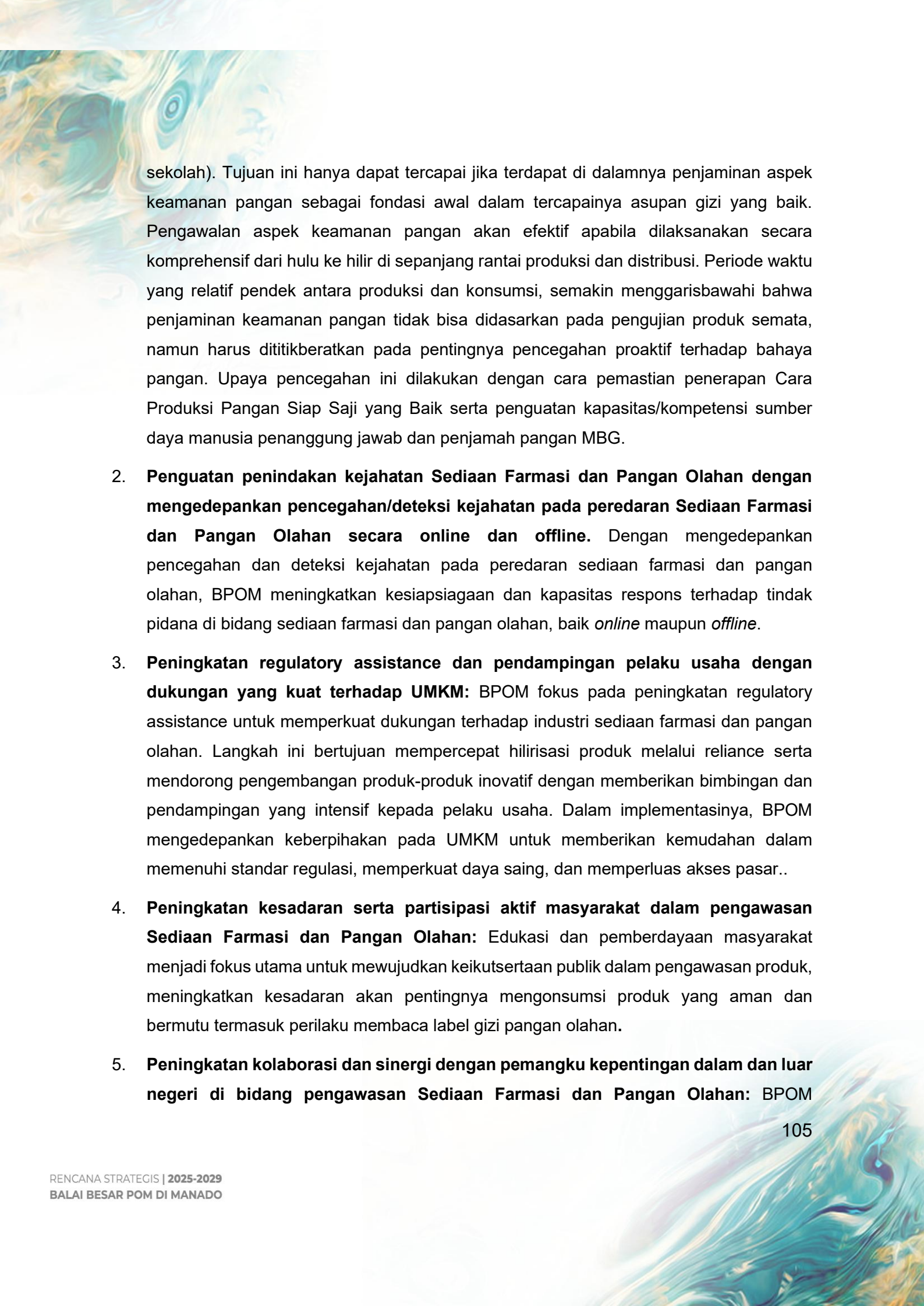
III. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

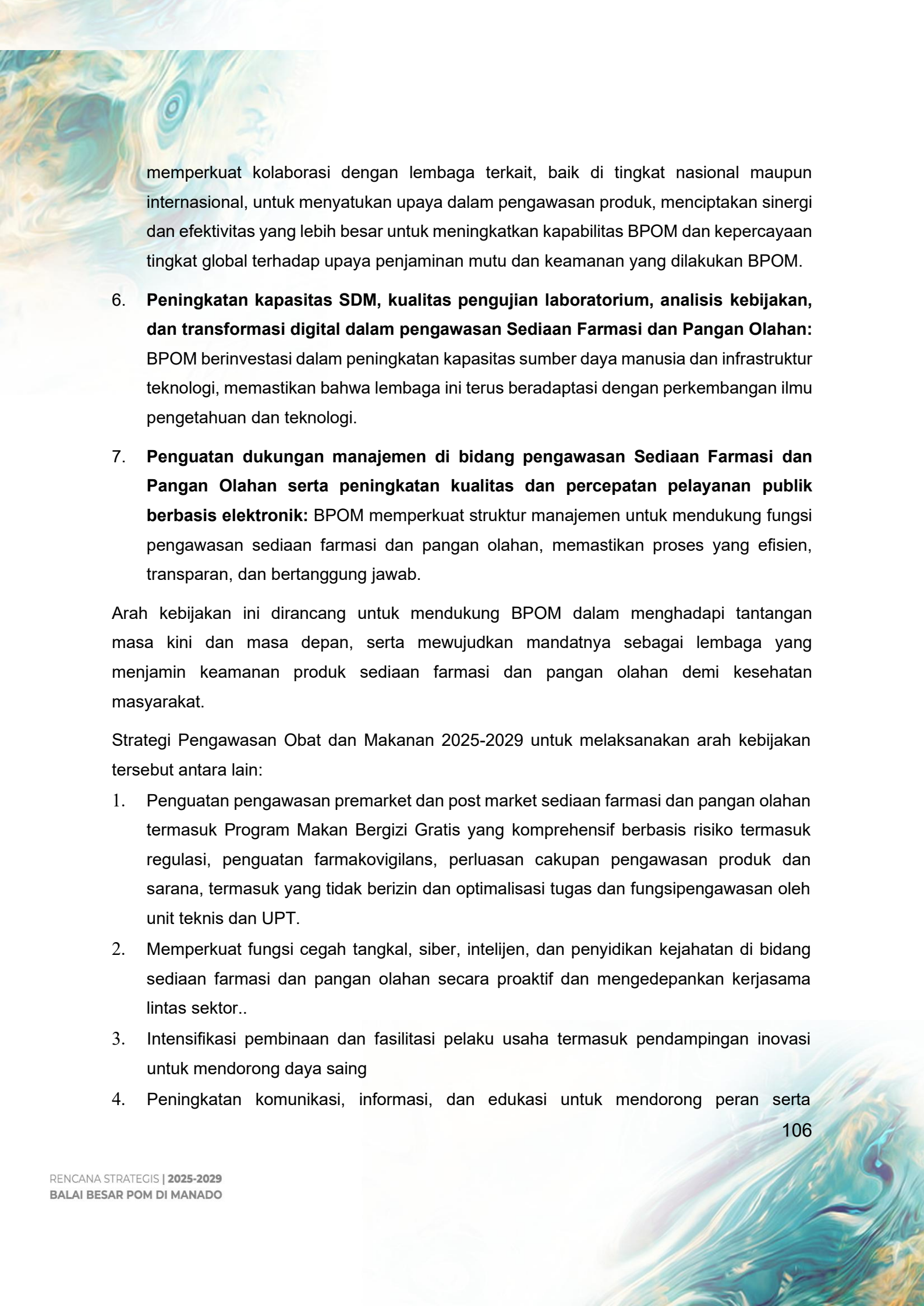
- 1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak



sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar..
4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM



memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor..
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta

masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan /deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

III. 2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Manado

Balai Besar POM di Manado mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan /deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Balai Besar POM di Manado dalam menyusun strategi pelaksanaan arah kebijakan tersebut melalui analisis SWOT untuk memastikan keselarasan antara potensi internal dan tantangan eksternal. Dalam menavigasi landscape yang terus berubah, Balai Besar POM di Manado mengakui pentingnya membangun fondasi yang kuat berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kapasitas internalnya. Analisis SWOT yang telah dilakukan memberikan pemahaman mengenai kekuatan Balai Besar POM di Manado, seperti SDM yang berdedikasi dan kompeten, kepemimpinan yang visioner, kualitas pelayanan publik yang prima serta infrastruktur yang memadai. Di sisi lain, dengan mengidentifikasi kelemahan seperti keterbatasan dalam meningkatkan sistem TI, Balai Besar POM di Manado menetapkan langkah-langkah konkret untuk perbaikan internal. Melalui evaluasi ini, Balai Besar POM di Manado berkomitmen untuk mengatasi hambatan internal sambil mempertahankan dan meningkatkan aspek yang telah menjadi kekuatan utamanya.

Lebih lanjut, analisis terhadap peluang dan ancaman eksternal memberi Balai Besar POM di Manado perspektif yang diperlukan untuk memperkuat strategi adaptasi dan inovasinya. Di era digital saat ini, kesempatan untuk mengintegrasikan teknologi canggih dalam operasional menjadi titik fokus, memberikan peluang Balai Besar POM di Manado untuk mempercepat proses pengawasan dan peningkatan layanan. Sementara itu, ancaman seperti masih banyaknya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi Obat dan Makanan, serta situasi atau kondisi lingkungan strategis yang mengalami gejolak atau volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas yang

membutuhkan pengawasan dan respon yang lebih dinamis. Dengan mengadopsi strategi yang proaktif dan berbasis data, Balai Besar POM di Manado bertujuan untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi tantangan global tetapi juga menjadi pemimpin dalam inovasi dan keamanan produk kesehatan.

Ringkasan yang ditampilkan pada matriks SWOT berikut ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Manado, serta strategi yang ditujukan untuk memperkuat posisi organisasi dalam jangka panjang. Setiap aspek dari analisis SWOT telah diintegrasikan ke dalam rencana strategis untuk mengoptimalkan sumber daya internal, meningkatkan respon terhadap perubahan eksternal, dan menjamin bahwa Balai Besar POM di Manado dapat terus menjalankan perannya secara efektif dalam memastikan keamanan Obat dan Makanan di Indonesia

Tabel 3. 2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Manado

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) mencakup pre-market dan post market yang berbasis risiko termasuk Program Makan Bergizi Gratis
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan /deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Optimalisasi Informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kolaborasi dengan Lintas Sektor dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Optimalisasi pengelolaan SDM sumber daya manusia kompeten professional, gesit dan adaptif yang akan berkontribusi pada pengembangan birokrasi yang tangkas. 2. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana, kajian, pengujian, database pengawasan. 3. Meningkatkan kemampuan menghadapi permintaan konsumen dan perkembangan yang bisa muncul secara tiba-tiba dengan pendekatan Vision, Understanding, Clarity dan organisasi yang agile
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Manado termasuk peningkatan pelayanan publik 2. Pengelolaan sarana prasana /infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI
	3. Optimalisasi IT dalam rangka transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui integrasi SPBE

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implemetasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Manado juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Manado melaksanakan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Sarana Prasarana BPOM.

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM."

a. Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

1. Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan
Penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan adalah tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan kualitas obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Perencanaan dan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dilakukan melalui (1) Penentuan tujuan dan lingkup utama analisis; (2) Pembentukan tim yang terdiri dari ahli di bidang Obat dan Makanan, ahli hukum, serta personel penegak hukum; (3) Memastikan sumber daya yang diperlukan; (4) Membuat rencana operasional; (5) Pengumpulan Sumber Data; (6) Pemantauan secara berkala untuk mendeteksi tren dan pola yang mencurigakan, seperti peningkatan

penjualan produk tertentu yang dicurigai berbahaya; (7) Penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan bukti fisik atau sampel produk yang mencurigakan. Analisis kejahatan Obat dan Makanan merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk obat dan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini memerlukan kerja sama antara BPOM, penegak hukum, dan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindak kejahatan yang terkait dengan produk tersebut.

2. Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan

Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan adalah dua komponen yang penting dalam upaya untuk mengidentifikasi dan melawan kejahatan terkait Obat dan Makanan di dunia maya atau dalam jaringan. Patroli Siber adalah kegiatan pemantauan, analisis, dan intervensi terhadap kegiatan yang terkait dengan dunia maya dan internet yang berkaitan dengan produk Obat dan Makanan. Profiling kejahatan obat dan makanan adalah proses menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi pola atau karakteristik pelaku kejahatan dalam industri Obat dan Makanan. Langkah selanjutnya adalah verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan adalah tahap penting dalam menjaga integritas dan akurasi informasi yang digunakan dalam penindakan dan pencegahan kejahatan terkait Obat dan Makanan serta Evaluasi kegiatan patroli siber dan profiling kejahatan Obat dan Makanan

3. Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan

Upaya peningkatan komunikasi dan persamaan persepsi antara PPNS dan Petugas BBPOM di Manado dengan Criminal Justice System dan stakeholder yang berada di wilayah kerja BBPOM di Manado. Dengan dilaksanakannya koordinasi secara konsisten, diharapkan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan penyelesaian kasus di bidang obat dan makanan sangat tergantung aturan dan kebijakan institusi. Agar ada kesamaan dalam penerapan aturan perlu adanya kesamaan pemahaman terhadap aturan atau kebijakan yang ada. Penyamaan persepsi ini tidak hanya di tingkat manajemen tetapi juga sampai ke level individu

yang langsung menangani sehingga diperlukan juga peningkatan kompetensi petugas.

b. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan

1. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi

Kegiatan strategis pemeriksaan dalam rangka sertifikasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado diantaranya melalui kegiatan (1) **Pelayanan prima, bimtek e gistrasi dan pendaftaran Obat dan Makanan** yang berkolaborasi Direktorat Pangan Olahan. Registrasi pangan olahan merupakan awal dari kegiatan pengawasan keamanan pangan sebelum pangan olahan tersebut diedarkan di wilayah Indonesia sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan berkelanjutan bagi pelaku usaha agar selalu terupdate dengan perkembangan terbaru. Selain sosialisasi juga dilakukan desk konsultasi bagi pelaku usaha yang sedang dalam proses registrasi; (2) **Pendampingan Inovasi UMKM Lokal Spesifik Unggulan Daerah**. Usaha Mikro, Menengah dan Kecil merupakan pondasi yang mendukung ekonomi makro masyarakat yang saat ini menjadi salah satu fokus Program Pembangunan Ekonomi Kemasyarakatan. Untuk mendukung program tersebut, Balai Besar POM di Manado membuat program untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan standar produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Menengah dan Kecil di wilayah Sulawesi Utara sehingga makin tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing baik di pasar nasional maupun global; (3) **Peningkatan kompetensi petugas. Seiring dengan peningkatan daya saing UMKM**, diperlukan peran fasilitator dalam hal ini petugas pelayanan publik sertifikasi yang akan mendampingi UMKM dalam pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan Obat dan Makanan. Untuk itu diperlukan tenaga yang kompeten dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM tersebut sehingga pelayanan publik semakin meningkat dan senantiasa memberikan pelayanan publik prima yang menerapkan prinsip efektif, efisien, inovatif dan komitmen mutu yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah (1) **Audit Pre-sertifikasi dalam rangka penerbitan izin penerapan CPPOB/CPOTB/CDOB/CPKB sertifikasi**, Kegiatan ini dilakukan untuk mendampingi pelaku usaha dalam melakukan proses sertifikasi, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sebelum beredar produk yang akan didaftarkan sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan; (2) **Pendampingan dalam rangka monitoring sertifikasi sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan**, kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa sebelum beredar produk yang akan didaftarkan sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu untuk mempermudah pemahaman masyarakat terkait tata cara sertifikasi dan registrasi CPPOB/CPOTB/CPKB/CDOB, pendampingan juga dilakukan dengan memberikan informasi yang menggunakan brosur, leaflet serta banner yang dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha; (3) **Pelatihan Fasilitator Penyuluh Keamanan Pangan Dalam Rangka Pendampingan Penerapan CPPOB/HACCP di UMKM**, diperlukan peran fasilitator dalam hal ini petugas pelayanan publik sertifikasi yang akan mendampingi UMKM dalam pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan Obat dan Makanan. Untuk itu diperlukan tenaga yang kompeten dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM tersebut sehingga pelayanan publik semakin meningkat dan senantiasa memberikan pelayanan publik prima yang menerapkan prinsip efektif, efisien, inovatif dan komitmen mutu yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

c. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Program KIE Badan POM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat agar dapat melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif, dengan mengedukasi Masyarakat umum dan pembentukan kader atau duta pengawasan Obat dan Makanan, serta memberdayakan Masyarakat dengan peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan Strategis yang dilakukan adalah

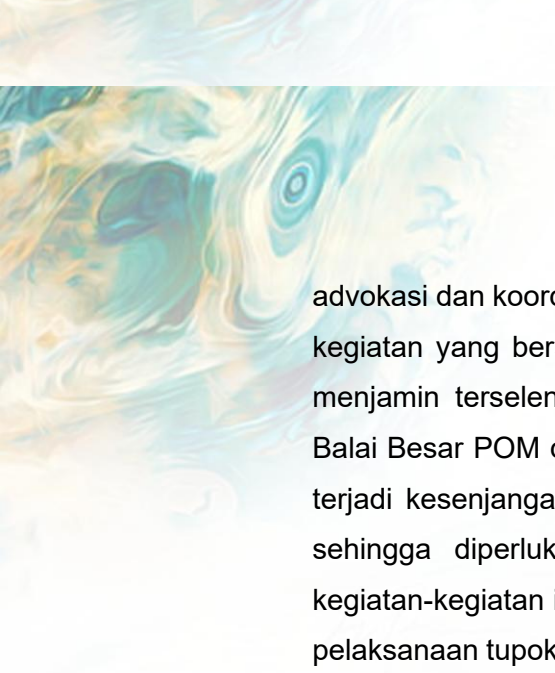
Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi terdiri dari **(1) KIE bersama Tokoh Masyarakat; (2) Penyebaran Informasi Obat dan Makanan Umum**. Penerima manfaat Sosialisasi/Penyebaran Informasi Produk Obat dan Makanan Responsif Gender yaitu semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan.

2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Kegiatan strategis yang dilaksanakan adalah **(1) Koordinasi Kegiatan Infokom dengan Lintas Sektor /Pemantauan Toksikovigilance**, Kegiatan koordinasi kegiatan infokom dengan lintas sektor dalam hal ini termasuk didalamnya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah terkait Surat Edaran Kemendagri Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu koordinasi juga bisa dilaksanakan dalam hal pemantauan/monitoring toksikovigilance di wilayah Provinsi Sulawesi Utara; **(2) Peningkatan Kompetensi SDM**, Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan mendukung pengembangan karier PNS dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan telah diperolehnya predikat pelayanan prima, dan perkembangan teknologi, tantangan internal maupun eksternal dan semakin tingginya harapan masyarakat pengguna layanan menyebabkan pelatihan bagi petugas layanan publik menjadi sangat penting; **(3) Pemantauan Obat dan Makanan dengan Operasional Mobil Laboratorium Keliling**, sebagai salah satu bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dengan melakukan pengawasan/pengujian *on the spot* di kab/kota catchment area Balai Besar POM Manado menggunakan rapid test kit.

d. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar/Balai POM sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien maka obat dan makanan yang beredar di masyarakat dapat dijamin keamanan, manfaat dan mutunya. Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan BB/Balai POM dilakukan pertemuan dengan pimpinan, kegiatan workshop, seminar atau kegiatan lainnya berupa



advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor baik yang telah direncanakan ataupun kegiatan yang bersifat mendesak, sehingga perlu dilakukan penganggaran untuk menjamin terselenggaranya kegiatan tersebut. Secara internal petugas/pegawai Balai Besar POM di Manado di dominasi oleh Perempuan, sehingga kemungkinan terjadi kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tupoksi sehingga diperlukan proporsi yang seimbang dalam kepersertaan kegiatan, kegiatan-kegiatan ini juga merupakan kegiatan penunjang bidang lain terkait dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk Obat dan Makanan.

1. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan strategis yang dilaksanakan adalah (1) meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan, pusat dalam hal ini unit kerja terkait di pusat perlu menyamakan persepsi dengan balai, membimbing dan mengawal balai di daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga kinerja balai meningkat; (2) kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dalam bentuk kegiatan sosialisasi maupun publikasi secara internal maupun eksternal sebagai stimulant kegiatan dalam rangka meningkatkan indeks RB Tahun 2025 menuju WBK/WBBM; (3) Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (4) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 di lingkungan Balai Besar POM di Manado yang terintegrasi dengan SPIP – Manajemen Risiko dan pengawalan implementasi RB untuk meningkatkan kualitas aparatur yang berintegritas dan berkinerja; (5) Kegiatan-kegiatan terpadu yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian aparatur penyelenggara negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi dan akuntabilitas, demi terciptanya *good governance* dan *clean government*; (6) Kegiatan pemutakhiran data BMN untuk menyamakan data antara satker dengan data pusat serta data yang tercatat pada aplikasi Kementerian Keuangan.

2. Pelaksanaan Koordinasi

Kegiatan Strategis yang dilakukan adalah (1) meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai Balai Besar POM di Manado di catchment area Balai Besar POM di Manado melalui kunjungan kerja, advokasi maupun koordinasi dengan lintas sektor/pemerintah daerah kabupaten/kota; (2) kegiatan yang mengikutsertakan seluruh pegawai Balai Besar POM di Manado, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan-peraturan terbaru terkait kepegawaian yang berlaku di lingkungan Badan POM ataupun dengan adanya perkembangan teknologi informasi seperti Pelatihan Ahli K3 Umum, Bimtek Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K); Bimtek dan Diklat Perpajakan; Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Pelatihan IT pendukung pengembangan aplikasi dan website; (3) Kegiatan-kegiatan terpadu yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian aparatur penyelenggara negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi dan akuntabilitas, demi terciptanya *good governance* dan *clean government* (4) Kegiatan Rakernas, sebagai forum perencanaan BPOM tahun $n+1$ bersama seluruh Unit Kerja BPOM serta melibatkan stakeholder BPOM; (5) Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan POM terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta UMK; (6) menyeragamkan pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sertifikasi kepada para auditor khususnya lead Auditor untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan calon lead auditor dalam merencanakan dan melaksanakan audit Sistem Manajemen Mutu baik internal maupun eksternal sesuai ISO 9001:2015; (7) Program anti korupsi Badan POM merupakan salah satu tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sehingga perlu penguatan anti korupsi diadakan untuk

meningkatkan pemahaman terkait upaya dalam penguatan anti korupsi dan mengembangkan budaya organisasi anti korupsi.

e. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

Dengan semakin berkembangnya komunitas obat dan makanan yang beredar di masyarakat, harus diimbangi pula dengan informasi tentang keamanan obat dan makanan yang beredar. Balai Besar POM di Manado sebagai Instansi pelaksana teknis penanggung jawab terhadap keamanan obat dan makanan khususnya di wilayah sulawesi utara, dipandang perlu untuk sering dilakukan dialog interactive dan penyampaian informasi kepada media massa atas perkembangan pengawasan Obat dan Makanan dan diharapkan komunikasi tersebut menyentuh kepada masyarakat melalui sarana media cetak maupun elektronik.

1. Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah melaksanakan publikasi Obat dan Makanan dengan penerima manfaat layanan publikasi obat dan makanan yaitu semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dengan adanya keseimbangan antara laki-laki dan Perempuan.

f. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Kegiatan strategis yang dilakukan untuk menunjang program Badan POM dalam fungsi pengawasannya, Balai Besar POM di Manado berusaha melakukan upaya terus-menerus melalui perencanaan yang lebih baik untuk melengkapi sarana dan prasarana di lingkungan Balai Besar POM di Manado. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Manado akan mengadakan AC, meja kerja dan set sofa. Peralatan - peralatan tersebut diperlukan untuk mengganti peralatan yang sudah lama dan sudah rusak.

g. Perangkat pengolah data dan komunikasi

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Salah satu upaya untuk mencapai good government adalah akuntabilitas kinerja suatu institusi, yang diantaranya dapat dicapai dengan melakukan tertib administrasi. Penyediaan alat pengolah data menjadi hal yang penting sebagai salah satu prasarana yang dibutuhkan untuk maksud tersebut. Suatu kegiatan

akan dikatakan telah selesai dilaksanakan dan mempunyai makna apabila telah dilakukan pelaporan yang benar dan tepat waktu, sehingga hasil kegiatan tersebut dapat dievaluasi ataupun dilakukan tindak lanjut. Untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana serta mengganti peralatan yang telah rusak, maka akan diadakan laptop, PC, scanner, proyektor, acces point, dan printer.

h. Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan

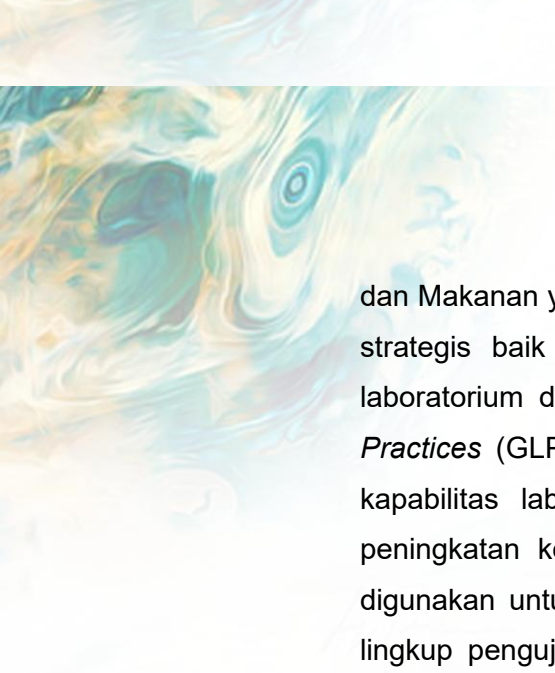
1. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang beredar di Provinsi Sulawesi Utara, Balai Besar POM di Manado menggunakan reagen kimia dan media mikrobiologi untuk melakukan pengujian. Penggunaan reagen kimia dan media mikrobiologi tersebut menghasilkan limbah yang sebagian kecil terbuang pada saat pencucian alat-alat laboratorium. Limbah yang terbuang tersebut, tidak bisa dibuang langsung ke lingkungan. Netralisasi limbah sangat diperlukan dalam rangka menjaga masyarakat dan lingkungan sekitar Balai Besar POM di Manado dari limbah yang dihasilkan. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang kompatibel dengan sisa limbah buangan Laboratorium Balai Besar POM di Manado. Dua komponen utama yang diperlukan adalah mesin IPAL dan konstruksi IPAL yang keduanya saling terkait. Diharapkan bahwa IPAL yang dibangun tidak hanya memiliki fungsi pengelolaan limbah, namun juga fungsi estetika.

i. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

1. Peningkatan ruang lingkup pengujian

Pengawasan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat



dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium direfleksikan ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP). Kegiatan strategis dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dilakukan Balai Besar POM di Manado melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian. Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar POM di Manado juga mengacu pada system Regionalisasi Laboratorium sebagai Region yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih unggul sebagai Laboratorium Regional yang melakukan pengujian spesifik.

2. Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium

Kegiatan strategis yang dilakukan yaitu **(1) Evaluasi Teknis Pengujian Melalui Uji Profisiensi/Uji Banding/Uji Kolaborasi/Kolaborasi Metode Analisis**, Uji Profisiensi/Uji Banding/Uji Kolaborasi dilakukan untuk memantau kompetensi atau mutu tenaga penguji dan laboratorium penguji serta mengembangkan teknis pengujian dalam menerapkan sistem mutu sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2017 dengan melihat unjuk kerja pengujian laboratorium di Balai Besar POM di Manado. Hasil yang diharapkan dari uji profisiensi adalah peningkatan kinerja laboratorium dan citra pengujian laboratorium Balai Besar BPOM di Manado.

j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Di BBPOM di Manado

Salah satu bentuk kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Manado yaitu Operasi Penindakan terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan peredaran produk obat dan makanan sehingga masyarakat tidak terpapar/mengonsumsi obat dan makanan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan.

1. Operasi Intelijen

kegiatan Intelijen yang menggunakan sumber daya Intelijen, yang disusun dan diorganisir secara khusus terkait dugaan tindak pidana yang lebih kompleks dan

telah memiliki informasi awal yang cukup guna dihadapkan pada penanganan target operasi dalam waktu/daerah tertentu.

2. Gelar Kasus dan Pelaporan

Kegiatan gelar kasus merupakan kegiatan membedah kasus dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan dengan mengundang pejabat/pakar/ahli yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan masukan/saran terhadap tindak lanjut dugaan kasus tindak pidana sedangkan pelaporan dilakukan setelah operasi intelijen dilakukan.

3. Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP
Merupakan kegiatan untuk mempersiapkan operasi penindakan yang meliputi persiapan teknis penindakan, sarana, dan prasarana penindakan serta koordinasi dengan ICJS terkait seperti Korwas PPNS Polri,dll.

4. Operasi Penindakan

Merupakan serangkaian kegiatan untuk memeriksa, menggeledah, melakukan olah TKP, meminta keterangan, mengamankan, dan menyita barang yang digunakan dalam tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dengan target yang telah ditentukan dan menggunakan sumber daya yang telah ditetapkan.

5. Pemberkasan

Pemberkasan merupakan tahapan setelah hasil operasi penindakan ditindaklanjuti dengan pro Justitia yang terdiri atas tahapan sebagai berikut:(1) Penyelesaian Berkas Perkara; (2) Gelar Perkara; (3) Penyerahan Tahap I s.d perkara sampai pada Tahap II.

6. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)

urgensi kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah untuk menindaklanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana obat dan makanan yang harus ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Manado.

k. Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman

Kegiatan intervensi keamanan PJAS, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Salah satu keterlibatan Badan POM dalam gerakan nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS.

1. Koordinasi lintas sektor

Pertemuan dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan program intervensi PJAS, menggali ketersediaan program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan, menggalang komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan pangan secara berkesinambungan, merancang kegiatan yang dapat disinergikan, serta menyusun rekomendasi untuk keberlangsungan program intervensi keamanan pangan.

2. Intervensi keamanan PJAS

Kegiatan Strategis yang dilakukan **(1) Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah**. Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (Kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orangtua siswa, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah; **(2) Bimtek Keamanan Pangan Sekolah**; **(3) Pengadaan Dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan PJAS**, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian materi cetak maupun digital berupa permainan/games edukasi keamanan pangan, materi Keamanan Pangan dalam bentuk audio visual dan media cetak keamanan pangan; **(4) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah**, kegiatan ini untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah; **(5) Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman**, Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan sebelum dilanjutkan kepada tahap berikutnya (Level 2), serta melakukan evaluasi mandiri (self assessment) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS

Aman; **(6) KIE Program PJAS Melalui Media Cetak/Elektronik**, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman bagi kader, komunitas sekolah dan masyarakat luas juga dilakukan melalui KIE media cetak/eletronik dan seperti pembuatan baliho keamanan pangan dan SMS blasting terkait keamanan pangan; **(7) Saka POM**, Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) sebagai wadah bagi anggota gerakan Pramuka yang memiliki kepedulian terhadap pengawasan Obat dan Makanan.

I. Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting.

1. Perkuatan kapasitas desa

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah **(1) Koordinasi dan Advokasi Terpadu Program Nasional Kelembagaan Desa, PJAS, dan Pasar Aman**, Pertemuan dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan program intervensi PJAS, menggali ketersediaan program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan, menggalang komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan pangan secara berkesinambungan, merancang kegiatan yang dapat disinergikan, serta menyusun rekomendasi untuk keberlangsungan program intervensi keamanan pangan.

2. Pemberdayaan komunitas desa

Kegiatan Strategis yang dilakukan **(1) Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa**, Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan; **(2) Gap Asesment/Pengambilan Data/Suvey Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman**, kegiatan survei pre intervensi dilakukan terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku kader dan komunitas desa

mengenai keamanan pangan, Hasil survei ini dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, survei post intervensi dilaksanakan setelah berakhirnya intervensi keamanan pangan bagi kader dan komunitas desa; **(3) Bimtek Komunitas Desa Dan Pelaku Usaha Pangan Desa (Komunitas PKK, PKL, Sekolah, Dan Pelaku Usaha PIRT dan Ritel,** pemberdayaan komunitas desa diharapkan masyarakat yaitu ibu rumah tangga dapat menyiapkan dan mengolah pangan sesuai dengan prinsip keamanan pangan, anak-anak mampu memilih dan membeli pangan jajanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyedia pangan (ritel, PKL, IRTTP dll) dapat menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi; **(4) Fasilitasi Keamanan Pangan bagi Komunitas Desa Dan Pelaku Usaha Pangan Desa,** kegiatan fasilitasi keamanan pangan perlu dilakukan bagi komunitas desa dan usaha pangan agar desa menjadi mandiri dan mampu mencegah serta menangani permasalahan keamanan pangan yang ada di lingkungannya; **(5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa Dengan Operasional Mobkel,** kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan program dan kondisi penerapan keamanan pangan di desa.

3. Pengawasan keamanan pangan desa

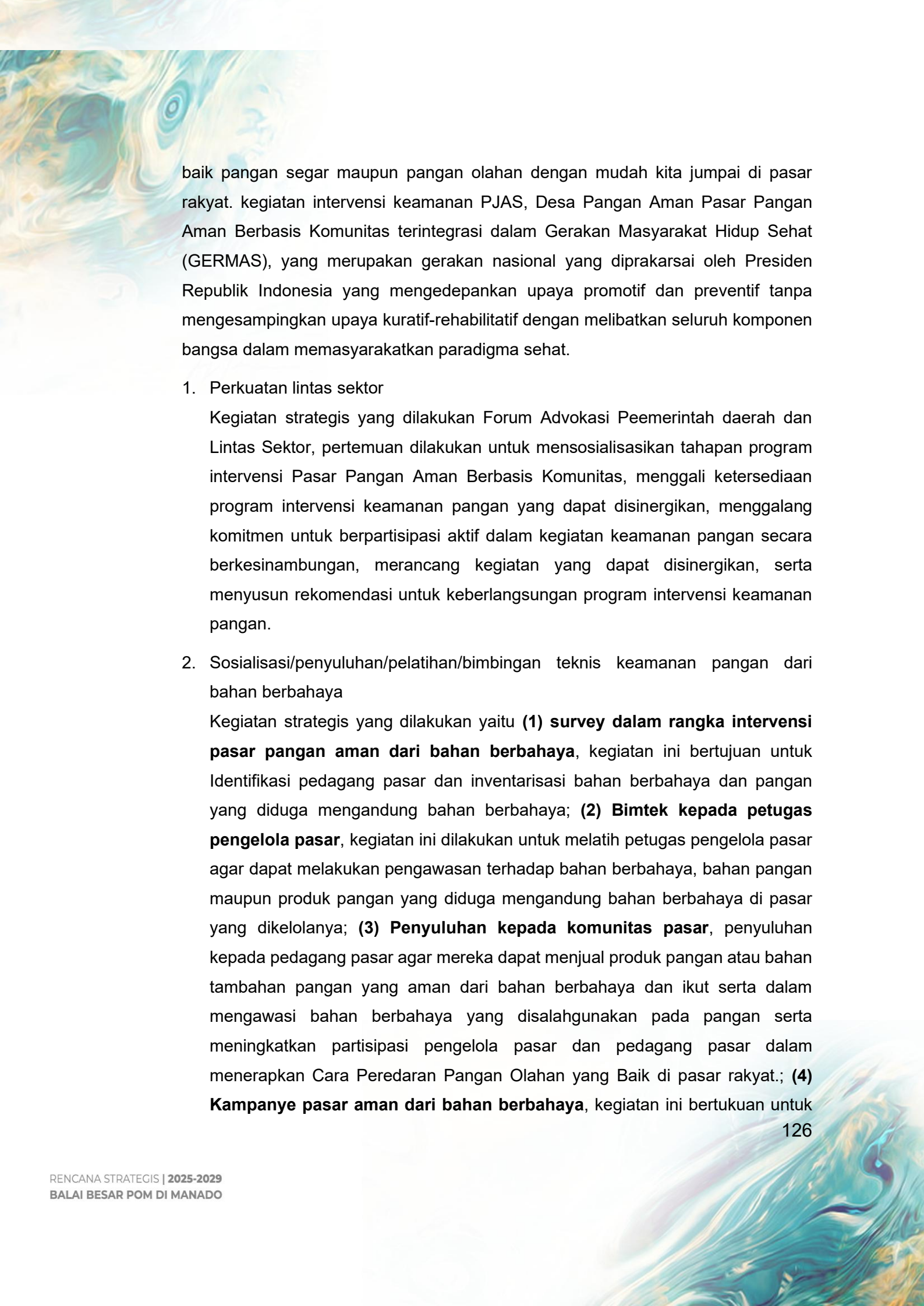
Kegiatan strategis yang dilakukan adalah Pengawasan GKPD/Kelurahan yang Sudah Diintervensi dan Lomba Desa Pangan Aman, untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa PAMAN.

4. Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya

Kegiatan Strategis yang dilakukan adalah kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Gkpd, PJAS, dan Pasar Aman untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program.

m. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan,



baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. kegiatan intervensi keamanan PJAS, Desa Pangan Aman Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat.

1. Perkuatan lintas sektor

Kegiatan strategis yang dilakukan Forum Advokasi Pemerintah daerah dan Lintas Sektor, pertemuan dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, menggali ketersediaan program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan, menggalang komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan pangan secara berkesinambungan, merancang kegiatan yang dapat disinergikan, serta menyusun rekomendasi untuk keberlangsungan program intervensi keamanan pangan.

2. Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya

Kegiatan strategis yang dilakukan yaitu **(1) survey dalam rangka intervensi pasar pangan aman dari bahan berbahaya**, kegiatan ini bertujuan untuk Identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya; **(2) Bimtek kepada petugas pengelola pasar**, kegiatan ini dilakukan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya; **(3) Penyuluhan kepada komunitas pasar**, penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat.; **(4) Kampanye pasar aman dari bahan berbahaya**, kegiatan ini bertujuan untuk

peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya.

3. Pemantauan dan evaluasi

kegiatan monitoring dan evaluasi adalah pengambilan contoh dan pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.

n. Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi Farmakovigilans kepada petugas di sarana Kesehatan

o. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar

Kegiatan Fasilitas dan Penampingan UMKM ditujukan untuk meningkatkan standar produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Menengah dan Kecil di wilayah Sulawesi Utara. Program ini dibuat untuk mendukung upaya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan ekonomi menengah di Masyarakat Indonesia.

1. Advokasi dan Pendampingan UMKM

Usaha Mikro, Menengah dan Kecil merupakan pondasi yang mendukung ekonomi makro masyarakat yang saat ini menjadi salah satu fokus Program Pembangunan Ekonomi Kemasyarakatan. Dalam menghadapi era persaingan global dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional menjadi semakin krusial. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam memenuhi standar keamanan dan mutu produk, serta dalam memperluas akses pasar. Fenomena ini terlihat dari rendahnya jumlah UMKM yang berhasil meningkatkan status sertifikasi dari PIRT ke MD BPOM. Menjawab tantangan tersebut, Balai Besar POM di Manado menginisiasi proyek perubahan "PINTU MAPALUS KAWANUA, UMKM NAIK KELAS, dengan mengusung filosofi spesifik lokal gotong royong khas Minahasa yang menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Melalui inovasi platform digital terintegrasi dan

pendekatan literasi komprehensif, Balai Besar POM di Manado berkomitmen untuk memberdayakan UMKM agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi serta dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

p. Sampel Makanan yang Diperiksa

1. Pengujian laboratorium sampel makanan

Pengujian laboratorium merupakan salah satu jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman untuk dikonsumsi. Pengujian sampel merupakan tahapan lebih lanjut dari proses sampling produk beredar di masyarakat dalam rangka melaksanakan pengawasan post-market, dalam hal ini pada produk makanan. Dalam rangka mendukung proses pengujian sampel produk makanan tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan kajian dan perencanaan sampling bersama dengan fungsi Pemeriksaan.

2. Pengadaan sampel makanan

Pelaksanaan pengadaan sampel dilakukan sesuai rencana pelaksanaan sampel, dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau progress capaiannya. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan prioritas sampel yang telah ditetapkan dan mewakili tiap daerah yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Manado

q. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar

1. Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan

Pelaksanaan pengadaan sampel dilakukan sesuai rencana pelaksanaan sampel, dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau progress capaiannya. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan prioritas sampel yang telah ditetapkan dan mewakili tiap daerah yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Manado.

2. Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan

Pelaksanaan sampling mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Badan POM yang dirancang dan dievaluasi setiap tahunnya. Pelaksanaan sampling produk obat, Obat Bahan Alam dan suplemen Kesehatan dilakukan dengan pembelian sampel di tingkat retail maupun tingkat rantai distribusi yang paling dekat dengan konsumen.

r. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa

1. Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya

Cara Produksi yang Baik merupakan salah satu jaminan bahwa produk yang beredar di masyarakat terjamin keamanannya, oleh karena itu diperlukan audit post market ke sarana produksi untuk melihat konsistensi produsen dalam melakukan melaksanakan kegiatan produksi. Balai Besar POM di Manado dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Badan POM dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk masing – masing komoditi. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dilakukan terhadap seluruh produsen MD dan produsen obat tradisional yang terdaftar di BPOM serta industry rumah tangga lainnya.

s. Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa

1. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung RPJMN terkait dengan upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Bentuk kegiatan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi di wilayah kerja BBPOM di Manado yang merupakan produk makanan yang wajib difortifikasi vitamin, serta sampling produk pangan fortifikasi. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan dengan melihat kepatuhan sarana terkait dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta ketentuan terkait dengan penambahan vitamin/fortifikasi. Selanjutnya produk yang diproduksi dilakukan sampling dan dilakukan pengujian di laboratorium untuk melihat kadar fortifikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan CPPOB dan ketentuan terkait fortifikasi diharapkan dapat mendukung program pemerintah terkait penurunan angka stunting di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan perencanaan berdasarkan analisa risiko, atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan POM Pusat pada tahun 2025.

t. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa

Masih ditemukannya Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat beredar dipasaran, disamping itu dampak dari globalisasi perdagangan bebas dan kemajuan teknologi , penjualan lewat on line semakin marak mengakibatkan produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat banyak beredar dimasyarakat dan mudah untuk mendapatkannya. Di pihak lain, kesadaran pelaku usaha masih kurang memahami dan kurang mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga dikhawatirkan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat belum dapat di jamin keamanan mutu dan khasiatnya.

1. Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah **(1) Pemeriksaan sarana distribusi produk Obat dan Makanan**, Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi produk omka bertujuan untuk memonitor kesesuaian sarana dalam mengelola sediaan farmasi dan makanan, serta memastikan pengelola sediaan farmasi dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Pengelolaan sediaan farmasi dan makanan sesuai ketentuan oleh sarana distribusi memberikan jaminan produk yang didistribusikan memenuhi syarat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat; **(2) Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian**, pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian berdasarkan analisis resiko tiap daerah. Pemeriksaan mencakup aspek yang termasuk dalam cara distribusi obat yang baik. Hasil pemeriksaan sarana ditetapkan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut berupa: peringatan, peringatan keras, rekomendasi penutupan; **(3) Pengawasan Periklanan**, Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap iklan di media cetak dan media elektronik. Pengawasan periklanan dilakukan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengawasan iklan adalah media cetak dan elektronik. Pelaksanaanya dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara; **(4) Aksi Penertiban Kosmetik Ilegal dan TMS**, Kegiatan Aksi

Penertiban Kosmetik legal dan Tidak Memenuhi Syarat merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun secara serentak di seluruh Indonesia. melakukan inspeksi ke sarana pasar tradisional, pasar modern dan sarana distribusi kosmetik lainnya sesuai analisis risiko untuk menertibkan peredaran kosmetika khususnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, kedaluwarsa maupun yang ilegal. Produk kosmetik yang ditemukan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta terhadap pelaku usaha diberikan sanksi administratif hingga pelimpahan kasus kepada fungsi penindakan; **(5) Tindak Lanjut Pengawasan, Recall, Pengaduan dan Pemusnahan Produk Obat dan Makanan TMS**, Kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan, Recall, Pengaduan, dan Pemusnahan Produk Obat dan Makanan TMS merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana yang didasari adanya rekomendasi dari Badan POM pusat untuk melakukan pembersihan pasar dari produk tertentu karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil uji laboratorium, dinyatakan TMS oleh Negara Lain/*Post Market Alert System* (PMAS), pengaduan masyarakat, produk ditarik dari peredaran (*recall*) termasuk pembatalan nomor izin edar sehingga produk dilarang untuk diedarkan; **(6) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan**, kegiatan ini Dalam rangka pengawalan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya besar keagamaan, Balai Besar POM di Manado perlu melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu di peredaran. Kegiatan ini melibatkan juga lintas sektor terkait di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado. Kegiatan pengawasan ini berfokus pada produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa dan rusak. BBPOM Manado menargetkan pengawasan pada sarana peredaran yang memiliki rekam jejak kurang baik, distributor, ritel modern dan tradisional; **(7) Monitoring Pengawasan Obat dan Makanan**, kegiatan yang dilakukan berupa Monitoring pengawasan obat dan makanan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke lintas sektor untuk monitoring pelaksanaan rekomendasi atas pengawasan obat dan makanan yang telah diberikan sebelumnya.

2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana

Kegiatan strategis yang dilakukan yaitu (1) Koordinasi , Advokasi, Dan Monitoring Evaluasi, Kegiatan ini dilakukan untuk mengakomodir kegiatan koordinasi serta advokasi terkait isu strategis pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan, dengan BPOM dan/atau antar UPT BPOM, **(2) Kegiatan Terpadu** dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi; **(3) Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dak Non Fisik POM**, DAK Nonfisik BOK POM merupakan bagian dalam memenuhi kebutuhan tugas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Kegiatan Monev ini dilakukan untuk mengakomodir bentuk konsultasi / koordinasi ke Badan POM dan/atau antar BB/BPOM terkait strategi agar penyaluran DAK ini berjalan efektif, efisien dan capaian realisasinya akan maksimal; **(4) Pengendalian Anti-Microbial Resistensi (AMR)** Melalui Peningkatan serta Penerbitan Peredaran Antibiotik, merupakan pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan obat serta di sarana lainnya yang mengelola antibiotik termasuk pada sarana pelayanan Kesehatan hewan yang melibatkan lintas sektor terkait (Join Inspection); **(5) Pengayaan Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan**, Kegiatan Pengayaan Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasidan Suplemen Kesehatan bertujuan untuk penguatan dalam Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dan membahas strategi penganan efek samping obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan serta peningkatan kepatuhan pelaporan oleh pelaku usaha; **(6) Perkuatan Regionalisasi Laboratorium Dalam Rangka Sampling dan Pengujian**, Kegiatan sampling dan pengujian merupakan salah satu kegiatan pokok dan strategis untuk melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan melakukan verifikasi terhadap komitmen pelaku usaha dalam menjaga konsistensi keamanan dan mutu produk yang diproduksi dan diedarkan. Saat ini laboratorium Balai Besar POM di Manado menghadapi tantangan utama terkait hasil pengujian yang cepat dan valid. Untuk itu, laboratorium Balai Besar POM di Manado harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian Obat

dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global.

u. Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pengawasan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium direfleksikan ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP). Kegiatan strategis dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dilakukan Balai Besar POM di Manado melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian. Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar POM di Manado juga mengacu pada system Regionalisasi Laboratorium sebagai Region yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih unggul sebagai Laboratorium Regional yang melakukan pengujian spesifik.

1. Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium

Kegiatan analisis/pengujian yang dilakukan di laboratorium BPOM tidak terlepas kebutuhan terhadap alat untuk pengujian baik alat penunjang maupun alat utama. Laboratorium Balai Besar POM di Manado telah ditetapkan sebagai balai spesifik untuk pengujian beberapa parameter spesifik, sehingga diperlukan pemenuhan/peremajaan alat laboratorium seperti : KCKT detektor UV – PDA, Water Purifier, Semiautomatic Kjeldahl and Non-Kjeldahl Solution, Autoklaf, Inkubator, Multivortex, Stabilizer, Polarimeter, Alat Disolusi, GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry), KCKT dengan detektor UV-FLR ELSD,

Detector Conductivity untuk IC pengujian Br, Fl, Nitrat, Nitrit, Sianida, Column Heater Acquity Arc Ch-30A.

2) Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Manado

a. Layanan BMN

Balai Besar POM di Manado sebagai Satuan Kerja wilayah atau UAPPB-W mempunyai tugas membantu melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah, yang membawahi satkernya sendiri serta satker lain untuk melakukan pengelolaan BMN sehingga menghasilkan Laporan BMN dan Laporan Keuangan tingkat Wilayah yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output pengelolaan BMN yang salah satunya adalah Laporan BMN yang dihasilkan oleh Satker Wilayah akan turut serta mempengaruhi opini dari auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1. Penatausahaan BMN

Kegiatan Strategis yang dilakukan Konsolidasi Wilayah Satuan Kerja, dengan Balai Besar POM di Manado ditetapkan sebagai satker koordinator untuk wilayah satuan kerja maka perlu dilaksanakan konsolidasi wilayah satuan kerja. Balai Besar POM di Manado sebagai salah satu satker koordinator untuk wilayah satuan kerja Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara maka perlu melakukan konsolidasi wilayah satuan kerja. Kegiatan tersebut berguna untuk penyamaan persepsi sekaligus konsolidasi data terkait Laporan Keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta dengan mengundang UPT yang merupakan Satker Koordinator untuk Satker Wilayah Pelaporan Keuangan

b. Layanan Perkantoran

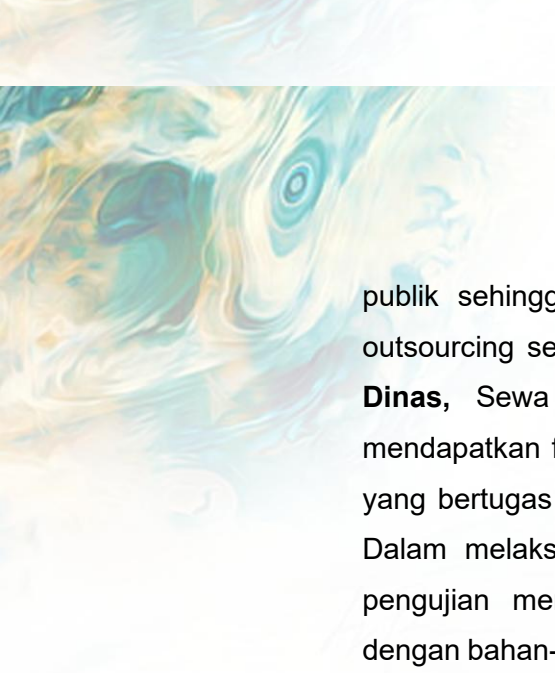
1. Gaji dan Tunjangan

Sebanyak 91 pegawai terdiri dari 28 pegawai laki-laki (30.68%) dan 63 pegawai perempuan (69.32%). Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Balai Besar POM di Manado memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sejumlah 56 pegawai (61.54%), diikuti Profesi sebanyak 16 pegawai

(17.58%), D3 sebanyak 7 pegawai (7.69%), non sarjana sebanyak 4 pegawai (4.40%), untuk S2 sejumlah 8 pegawai (8.79%) jumlah tersebut dari tahun ke tahun terus berkembang seiring dengan adanya fungsi dan tugas bagi pegawai berdasarkan golongan dan jabatan pegawai tersebut di atas perlu dialokasikan dana untuk pembayaran gaji rutin setiap bulannya.

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan Strategis yang dilakukan sebagai dukungan manajemen melalui **(1) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor**, Untuk operasional sehari-hari kantor Balai Besar POM di Manado memiliki peralatan perkantoran seperti tabung pemadam kebakaran, komputer, CCTV, UPS, alat studio komunikasi, pompa air, AC, dan printer dimana sering digunakan sehari untuk menunjang kegiatan operasional kantors sehingga perlu dilakukan pemeliharaan; **(2) Pemeliharaan Gedung Kantor**, menjadi cermin keindahan dan kebersihan lingkungan kantor sehinggamembuat nyaman pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari; **(3) Pemeliharaan Website**, **(4) Langganan Daya dan Jasa**, sebagai penunjang gedung dan bangunan kantor dan operasional laboratorium; **(5) Perawatan Kendaraan**, perbaikan kendaraan sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan baik berupa koordinasi dengan pemangku kepentingan serta pengawasan obat dan makanan; **(6) Operasional Perkantoran**, Dalam kegiatan perkantoran terdapat pengelolaan anggaran. Agar terlaksananya pengelolaan anggaran yang efisien, dan akuntabilitas maka diperlukan Tim Pengelolaan anggaran; **(7) Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**, Untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi terkait, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala genset sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, **(8) Administrasi Kegiatan Perkantoran**, Sebagai penunjang kegiatan perkantoran, ketersediaan barang keperluan sehari-hari perkantoran, ATK, bahan habis pakai, kebutuhan pencetakan dan lainnya menjadi tuntutan dalam menjamin pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan sepanjang tahun anggaran dapat terpenuhi dengan baik dan mencukupi yang selanjutnya berimbas pada pencapaian kinerja unit kerja. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional pelayanan



publik sehingga dapat berjalan dengan prima; **(9) Pengadaan Jasa** jasa outsourcing sebagai pendukung operasional perkantoran; **(10) Sewa Rumah Dinas**, Sewa rumah dinas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas rumah dinas yang layak bagi Kepala Balai Besar POM yang bertugas di Manado; **(11) Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan**, Dalam melaksanakan tugas pokok Balai Besar POM di Manado, petugas pengujian menghadapi resiko pekerjaan laboratorium yang berhubungan dengan bahan- bahan pereaksi maupun kimia dan media yang diperlukan dalam pengujian laboratorium sehingga besar kemungkinan mendapat bahaya dari bahan-bahan berbahaya terhadap kesehatan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, Balai Besar POM di Manado untuk periode 2025-2029 menyusun atriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai Besar POM di Manado dalam memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi Sulawesi Utara. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Balai Besar POM di Manado, serta indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar POM di Manado selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai Besar POM di Manado, yaitu memastikan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4. 1 Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Manado 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94.25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	98.00	98.30	98.50	98.80	99.00
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	94	95	96	97	98

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92	94	96	98
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25	91	92.75	94.5	96.25
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.20	91.20	92.60	94.00	95.40
		Persentase label produk tembakau dan / atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.79	79.57	81.78	83.04	86.9
		Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	8.33	25	41.67	58.33	91.67
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.24	90.13	91.02	91.91	92.80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11	15	18	19	20
		Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	8
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	3	3
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	17.95	35.90	55.13	76.92	100.00
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	93,5	94	94.5	95
9	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	90	91	92	93	94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
10	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Organisasi Unit yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	94.40	94.50	94.60	94.70	94.80
		Nilai AKIP UPT BPOM	82.20	82.25	82.30	82.35	82.40
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.04	3.11	3.18	3.25	3.32

IV.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2.1 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Manado 2025-2029

Program	Alokasi (dalam juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	23,646	26,011	28,612	31,473	34,621
Pengelolaan Sarana dan Prasarana POM	12,829	14,112	15,524	17,076	18,784
TOTAL	36,475	40,123	44,136	48,549	53,405

*Tabel 4.2.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Manado 2025-2029
Berdasarkan Sumber Dana*

Program	Alokasi (dalam juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	34,366	38,014	42,027	46,440	51,296
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109
TOTAL	36,475	40,123	44,136	48,549	53,405



BAB V

PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Manado 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Renstra Balai Besar BPOM di Manado Tahun 2025 - 2029 harus dijadikan acuan kerja bagi Balai Besar POM di Manado sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Diharapkan seluruh unit kerja sampai pada level individu. dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi,

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI MANADO TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Balai Besar POM di Manado								36,475	40,123	44,136	48,549	53,405	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								23,646	26,011	28,612	31,473	34,621	UPT BPOM	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	90	91	92	93	94.25						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BBPOM di Manado	26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BBPOM di Manado	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BBPOM di Manado	98	98.3	98.5	98.8	99						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	94	95	96	97	98						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	90	92	94	96	98						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	89.25	91	92.75	94.5	96.25						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	80	82	84	87	90						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	90.2	91.2	92.6	94	95.4						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BBPOM di Manado	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BBPOM di Manado	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Manado	77.79	79.57	81.78	83.04	86.9						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BBPOM di Manado	8.33	25	41.67	58.33	91.67						UPT BPOM
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	-	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		BBPOM di Manado	45	45	45	45	45						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BBPOM di Manado	435	435	435	435	435						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		BBPOM di Manado	805	812	852	894	939						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BBPOM di Manado	47	51	55	60	66						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BBPOM di Manado	370	398	424	453	484						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		BBPOM di Manado	-	204	204	216	216						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		BBPOM di Manado	1	1	1	1	1	1					UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BBPOM di Manado	1	1	1	1	1	1					UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BBPOM di Manado	1	1	1	1	1	1					UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		BBPOM di Manado	-	460	460	460	460	460					UPT BPOM

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI MANADO TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)						
								2025	2026	2027	2028	2029		
Balai Besar POM di Manado								36,475	40,123	44,136	48,549	53,405	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								23,646	26,011	28,612	31,473	34,621	UPT BPOM	
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi												UPT BPOM	
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Manado	80	80	80	100	100						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		BBPOM di Manado	4	4	4	5	5						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BBPOM di Manado	89.24	90.13	91.02	91.91	92.8						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BBPOM di Manado	11	15	18	19	20						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	BBPOM di Manado	4	7	7	7	8						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	BBPOM di Manado	1	2	2	3	3						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		BBPOM di Manado	12316	12363	12417	12479	12550						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		BBPOM di Manado	34	16	19	22	24						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		BBPOM di Manado	11	15	18	19	20						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman		BBPOM di Manado	4	7	7	7	8						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		BBPOM di Manado	1	2	2	3	3						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	BBPOM di Manado	17.95	35.9	55.13	76.92	100						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		BBPOM di Manado	14	14	15	17	18						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	BBPOM di Manado	93	93.5	94	94.5	95						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		BBPOM di Manado	6	5	6	6	6						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	BBPOM di Manado	90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		BBPOM di Manado	14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	BBPOM di Manado	4.7	4.75	4.8	4.85	4.9						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		BBPOM di Manado	215	228	229	235	239						UPT BPOM

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI MANADO TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Manado								36,475	40,123	44,136	48,549	53,405	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								23,646	26,011	28,612	31,473	34,621	UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												UPT BPOM
	1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BBPOM di Manado	94.4	94.5	94.6	94.7	94.8						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2 Nilai AKIP UPT BPOM	BBPOM di Manado	82.2	82.25	82.3	82.35	82.4						UPT BPOM
	3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BBPOM di Manado	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BBPOM di Manado	3.04	3.11	3.18	3.25	3.32						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	5 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	BBPOM di Manado	-	-	-	-	-						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	6 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	BBPOM di Manado	-	-	-	-	-						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	BBPOM di Manado	-	-	-	-	-						UPT BPOM
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	BBPOM di Manado	1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	BBPOM di Manado	1	-	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolahan data dan komunikasi	BBPOM di Manado	19	-	5	5	5						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								12,829	14,112	15,524	17,076	18,784	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Manado	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Manado	1	1	1	1	1						UPT BPOM

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANADO,

ttd.

HERMANTO



BADAN POM

BALAI BESAR POM DI MANADO